



Deloitte Indonesia Perspectives

Edisi ke-4, September 2024



Dewan Redaksi

Dewan Redaksi

Pimpinan Dewan Redaksi

Brian Indradjaja

Pimpinan Redaksi

Eleonora Bergita

Tim Redaksi

Eleonora Bergita

Monica Prilly Aditya

Agung Basawantara

Penyunting

Imelda M. Orbito

Prabandari I. Moerti

Steffi Mei Hui Goh

Eve Wai Kuan Yong

Perancang Grafis

Nicholas Kwong

Kontributor

Gabriella Gwenny Dermawan

Alstair Bharata

Efraim Leonardo Sitinjak

I.D.G Praharyan Jayadiputra

Hakim Anantaputra

Reza Akbar Muhammad

Jika Anda memiliki pertanyaan tentang artikel-artikel dalam edisi ini atau pertanyaan lain, silakan hubungi: iddtl@deloitte.com



Sepatah Kata dari Deloitte Indonesia Clients & Markets Coordinating Partner

Dengan senang hati saya sampaikan bahwa edisi keempat jurnal kami, Deloitte Indonesia Perspectives, sudah bisa Anda nikmati. Publikasi ini akan mengangkat tren dan isu terkini perekonomian, industri, dan bisnis. Kali ini, kami akan membahas pentingnya prinsip Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (LST) untuk diterapkan di Indonesia.

Prinsip LST menjadi semakin penting dalam aspek bisnis, investasi, dan sosial di era globalisasi dan keterhubungan ini. LST sering kali didefinisikan sebagai kerangka lengkap yang mengarahkan pengambilan keputusan menuju perilaku berkelanjutan dan bertanggung jawab, mendorong dunia di mana keuntungan dan pembangunan sosial serta kesehatan bumi hidup secara harmonis. Seiring berjalannya waktu, LST telah berkembang dari kumpulan pedoman sederhana menjadi sesuatu yang penting untuk perubahan sistemik. LST telah mengubah cara investor menilai prospek, cara dunia usaha mendefinisikan kesuksesan, dan cara masyarakat memandang bisnis sebagai bagian dari penciptaan masa depan yang lebih baik.

Pada edisi kali ini, kami akan mengajak Anda untuk mendalami evolusi LST dan mengapa pemberdayaan LST penting bagi perusahaan/organisasi/lembaga dalam artikel bertajuk "Mengapa LST penting?". Kemudian, dalam artikel "Mengintegrasikan LST ke dalam bisnis", kami menguraikan pendekatan *end-to-end* dalam mengintegrasikan LST ke dalam bisnis – sebuah strategi berharga yang diberikan oleh *ESG professional* Deloitte Indonesia. Terakhir, *ESG advisor* kami mengungkap lanskap dan peluang obligasi hijau (*green bonds*) di Indonesia dalam artikel "Menjembatani kesenjangan pendanaan iklim Indonesia dengan obligasi hijau". Selain itu, jangan lewatkan percakapan eksklusif kami dengan Sustainability & Climate Leader in Deloitte Indonesia, Imelda Orbito, di mana kami membahas kemajuan dan kompleksitas praktik LST di Indonesia.

Kami berharap edisi ini dapat memberi Anda wawasan berharga mengenai LST di Indonesia, dan menginspirasi Anda dalam mewujudkan dunia di mana kemakmuran selaras dengan pelestarian lingkungan dan kemajuan sosial untuk generasi mendatang.

Selamat membaca!

Salam hangat dari Deloitte Indonesia,

Brian Indradjaja

Clients & Markets Coordinating Partner
Deloitte Indonesia

Daftar isi

02

Dewan Redaksi

03

Sepatah Kata dari
Deloitte Indonesia
Clients & Markets
Coordinating
Partner

05

Secangkir Kopi
bersama Imelda
M. Orbito

12

Mengapa
Lingkungan, Sosial
dan Tata Kelola
penting?

20

Mengintegrasikan
Lingkungan,
Sosial dan Tata
Kelola ke dalam
bisnis Anda

26

Menjembatani
kesenjangan
pendanaan iklim di
Indonesia dengan
obligasi hijau

36

Publikasi
Deloitte Indonesia

37

Hubungi kami



Secangkir Kopi bersama **Imelda M. Orbito**

“Bisnis punya peran dan tanggung jawab yang sangat besar dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.”

Imelda M. Orbito

Deloitte Indonesia Audit & Assurance Partner and Sustainability & Climate Leader.



Meskipun perekonomian Indonesia secara bertahap pulih dari posisi terendahnya selama pandemi, dunia usaha terus menghadapi tekanan baik dalam hal keuangan, lingkungan hidup, dan sosial, sehingga menciptakan tantangan yang lebih kompleks. Tuntutan untuk memprioritaskan pengelolaan berkelanjutan, praktik etis, dan konsumerisme yang sadar telah mendorong para pelaku bisnis untuk mengadopsi strategi lingkungan, sosial, dan tata kelola (LST). Dalam diskusi berikut ini, Deloitte Indonesia Audit & Assurance Partner and Sustainability & Climate Leader, Imelda M. Orbito, berbagi pandangannya tentang pentingnya mengintegrasikan LST ke dalam dunia usaha. Ia menekankan manfaat dari praktik LST yang solid, dampak negatif dari pengabaian pilar-pilar LST, dan bagaimana pelaporan LST memberikan cara untuk mengukur risiko dan peluang bisnis yang penting untuk menarik investor dan meningkatkan kepercayaan konsumen. Ia juga berbicara tentang praktik LST di Indonesia dan tantangan yang dihadapi perusahaan, mulai dari kendala permodalan hingga operasional. Ia mendorong dunia usaha untuk menerapkan praktik keberlanjutan, karena hal ini akan memberikan peluang yang lebih besar di masa mendatang.



Q: Bagaimana pendapat Anda mengenai isu perubahan iklim global dan dampaknya terhadap Indonesia?

Imelda M. Orbito: Akhir-akhir ini, kita

semakin sering mendengar tentang peristiwa naiknya permukaan air laut, kenaikan suhu, bencana alam, dan cuaca ekstrem. Faktanya, saat ini kita sedang mengalami kejadian cuaca ekstrem yang akan berdampak sangat besar terhadap ketersediaan pangan, air, dan pada akhirnya menyebabkan gangguan perekonomian. Misalnya saja banjir dan hujan lebat yang terjadi di berbagai negara, termasuk Indonesia, yang tidak hanya membawa kerugian finansial dengan merusak infrastruktur, namun bahkan memakan banyak korban jiwa.

Tidak hanya manusia dan planet bumi, semua perubahan ini juga berpotensi berdampak pada bisnis dan operasional perusahaan. Misalnya saja perubahan pola cuaca yang berdampak negatif pada sektor pertanian, seperti gagal panen dan menurunnya hasil panen. Permasalahan serupa juga dialami oleh produsen garam yang mengalami kesulitan dalam menentukan jadwal panen garam karena pola cuaca yang semakin tidak dapat diprediksi. Ini akan menyebabkan gangguan ekonomi bagi mereka karena mereka tidak dapat memperkirakan secara akurat berapa banyak garam yang dapat mereka hasilkan dalam setahun.

Kita bisa melihat betapa mengancamnya kondisi iklim saat ini. Hampir separuh wilayah Jakarta, misalnya, berada di bawah permukaan laut. Indonesia terdiri dari populasi pesisir dan kenaikan permukaan laut berdampak pada produksi pangan, perekonomian, infrastruktur, ekologi, hutan tropis, serta ekosistem secara umum. Selain risiko fisik, perubahan iklim juga menimbulkan risiko transisi yang diakibatkan oleh perubahan kebijakan, hukum, teknologi, dan pasar akibat peralihan ke perekonomian rendah

karbon. Banyak negara kini mulai fokus memerangi perubahan iklim – salah satu aspek penting dari hal ini adalah dengan berkomitmen untuk mencapai *Net Zero Emissions* (NZE). Hal ini pada akhirnya juga berdampak pada bagaimana industri harus beradaptasi terhadap transisi ke arah tersebut.

Pada September 2022, Indonesia memperbarui komitmen *Enhanced Nationally Determined Contribution* (ENDC) untuk mengurangi target emisi gas rumah kaca (GRK) tanpa syarat menjadi 31,89% dan secara bersyarat atau dengan dukungan internasional menjadi 43,20% dibandingkan dengan skenario *business-as-usual* (BAU) pada tahun 2030. Selain itu, Indonesia juga memiliki target untuk mencapai *Net Zero Emissions* pada tahun 2060. Sesuai dengan komitmen nasional, perusahaan harus beradaptasi dan mengubah model bisnis mereka serta fokus pada masa depan agar dapat bertahan di pasar. Peran sektor swasta dalam inisiatif pengurangan GRK masih dibahas hingga saat ini. Beberapa tantangan yang dihadapi perusahaan di Indonesia umumnya disebabkan oleh kurangnya kesadaran akan risiko perubahan iklim dan tingkat pengembalian investasi yang kecil dalam inisiatif pengurangan karbon.



Q: Bagaimana perubahan iklim dan LST secara umum mempengaruhi dunia usaha di Indonesia? Seberapa penting peran dunia usaha dalam mengatasi isu perubahan iklim?

Imelda M. Orbito: (Mereka mempengaruhi) segalanya. Salah satu kerugian yang dialami perusahaan disebabkan oleh ketidakpatuhan mereka terhadap standar dan peraturan LST, terutama karena Pemerintah Indonesia semakin menekankan praktik keberlanjutan dan kepatuhan lingkungan oleh perusahaan. Selain itu, LST mempunyai peran yang sangat signifikan karena perubahan dari industri yang ada saat ini (*brown economy*) menjadi

industri yang ramah lingkungan (*green economy*) akan meningkatkan kinerja perekonomian perusahaan secara keseluruhan. Beberapa manfaatnya adalah perusahaan menerapkan praktik ketenagakerjaan yang lebih baik serta peningkatan tunjangan keamanan dan kesehatan bagi karyawannya. Mereka juga akan meningkatkan praktik tata kelola perusahaan yang baik dan etika bisnis. Hal ini juga akan berdampak pada reputasi dan *branding* perusahaan, karena para pemangku kepentingan kini menjadi lebih sadar akan dampak lingkungan dan sosial dari bisnis yang mereka ikuti. Perusahaan dengan praktik dan komitmen LST yang kuat kemungkinan besar akan menarik lebih banyak pelanggan dan investor.



Q: Dalam menyikapi isu perubahan iklim dan keberlanjutan, hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan oleh perusahaan?

Imelda M. Orbito: Ada tekanan dari regulator dan masyarakat agar perusahaan memulai upaya mereka dalam mengelola isu-isu perubahan iklim dan keberlanjutan. Namun, tidak mudah bagi masyarakat atau regulator untuk memahami risiko dan kinerja suatu perusahaan dalam upaya keberlanjutannya. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan untuk memastikan bahwa upaya, program, dan target keberlanjutan ini dilaporkan dengan benar. Pelaporan seperti ini penting bagi investor dan seluruh pemangku kepentingan lainnya untuk mendapatkan gambaran yang lebih baik mengenai apa yang telah dilakukan perusahaan dalam hal keberlanjutan. Perusahaan perlu melaporkan beberapa topik yang dianggap penting di setiap industri atau khusus untuk perusahaannya.

Terkait standar pelaporan keberlanjutan, terdapat beberapa standar yang sedang berkembang dan kemungkinan akan diimplementasikan di masa depan, salah satunya termasuk Standar Pengungkapan Keberlanjutan IFRS. Pada 26 Juni 2023, International Sustainability Standards Board (ISSB) meluncurkan IFRS S1 dan IFRS S2 yang akan berlaku efektif mulai 1 Januari 2024. IFRS S1 menetapkan persyaratan umum bagi perusahaan untuk mengungkapkan informasi mengenai risiko dan peluang terkait keberlanjutan yang diperlukan oleh pemangku kepentingan, khususnya investor, untuk pengambilan keputusan dan IFRS S2 menetapkan persyaratan bagi perusahaan untuk mengidentifikasi, mengukur, dan mengungkapkan informasi tentang risiko dan peluang terkait perubahan iklim.

Di Indonesia, Task Force Comprehensive Corporate Reporting (TF CCR) dibentuk oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) pada Desember 2020 sebagai respon terhadap pengembangan standar ISSB yang diinisiasi oleh IFRS Foundation. Pada konferensi KTT G20 pada November 2022, telah dilakukan penandatanganan *Memorandum of Understanding* (MoU) antara IAI dengan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) untuk memperkuat keterbukaan terkait *Sustainability Disclosure Standards* di mana IAI berkomitmen untuk menyusun standar pengungkapan keberlanjutan yang selaras dengan standar internasional yang dikeluarkan oleh ISSB.

Selain itu, Dewan Standar Keberlanjutan (DSK) IAI¹ dan Dewan Pemantau Standar Keberlanjutan (DPSK) IAI telah dibentuk pada tahun 2023. DSK dan DPSK IAI memiliki peran strategis dalam mempersiapkan infrastruktur untuk mendukung penerapan pelaporan keberlanjutan di Indonesia. Mengingat dukungan dan komitmen yang besar, kemungkinan besar perusahaan-perusahaan di Indonesia diharapkan untuk mengadopsi dan menerapkan IFRS S1 dan IFRS S2 di masa yang akan datang.

Selain itu, dalam hal pelaporan, perusahaan perlu menunjukkan apa yang menjadi sasarannya, apa saja risikonya, bagaimana cara menghadapinya, dan apa saja dampaknya. Dari sana masyarakat bisa menilai apakah perusahaan sudah berbuat cukup atau masih ada permasalahan keberlanjutan yang belum terselesaikan. Jadi, serupa dengan laporan keuangan, laporan keberlanjutan ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa perusahaan bertanggung jawab atas risiko dan produk yang mereka berikan kepada masyarakat.

Selain itu, di Indonesia, untuk mendukung pencapaian NZE pada tahun 2060, kita memiliki beberapa peraturan, seperti Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penerapan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional ("Perpres no. 98/2021"). Peraturan ini menjadi dasar pelaksanaan penetapan harga karbon (NEK) dan menjadi pedoman dalam penurunan emisi GRK melalui kebijakan, langkah, dan kegiatan untuk mencapai target NDC dan pengendalian emisi GRK dalam pembangunan nasional. Meskipun implementasi mekanisme pajak karbon masih ditargetkan pada tahun 2025, Indonesia akan memastikan bahwa infrastruktur dan peraturan yang diperlukan sudah tersedia.

1 Penamaan dewan keberlanjutan masih dalam pembahasan

Pada tahun 2023, Pemerintah Indonesia secara resmi meluncurkan Indonesia Carbon Exchange (IDXCarbon) untuk mendukung target nasional dan mengakomodasi kebutuhan perdagangan karbon di Indonesia. IDX menyediakan infrastruktur perdagangan karbon yang diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mengedepankan transparansi, likuiditas, efisiensi, dan kemudahan akses.



Q: Perubahan iklim merupakan bagian dari isu-isu LST, namun terdapat juga isu-isu lain dalam LST. Apakah isu-isu tersebut sama pentingnya dengan isu-isu lingkungan hidup ini?

Imelda M. Orbito: Pembahasan LST yang paling banyak dibicarakan adalah aspek lingkungan sebab dampaknya sangat terasa. Misalnya, kenaikan permukaan air laut yang antara lain mengakibatkan mencairnya beberapa zona gletser secara tiba-tiba, sehingga masyarakat bisa melihat langsung dampaknya. Selain lingkungan hidup, ada juga masalah sosial dan tata kelola.

Dari sisi permasalahan sosial, banyak sekali kasus ketenagakerjaan yang terjadi terutama pada merek-merek besar. Permasalahan tersebut berkisar pada bagaimana perusahaan-perusahaan tersebut memperlakukan karyawannya, misalnya dalam hal kompensasi karyawan, praktik ketenagakerjaan, kesehatan dan keselamatan karyawan, perselisihan perburuhan dan lain-lain. Kita bisa melihat kasus di media di mana beberapa perusahaan tidak memperlakukan karyawannya dengan baik. Mereka memiliki standar keselamatan dan kerja yang buruk, serta cara yang sangat dipertanyakan dalam menangani atau memperlakukan karyawannya. Lantas, apa dampaknya bagi perusahaan dari buruknya standar keselamatan dan kerja tersebut? Memang salah satunya adalah reputasi, namun ini juga menyebabkan *inventory loss* dan terganggunya produksi – hanya karena manajemen perusahaan tidak memiliki pola pikir yang benar sehingga dapat mengakibatkan gangguan tenaga kerja, sanksi hukum, dan lain-lain.

Mari kita lihat apa yang terjadi di Sri Lanka dan beberapa negara lainnya. Ada jenama ternama yang menggunakan pekerja anak sebagai tenaga kerjanya. Hal serupa juga terjadi di Bangladesh dengan banyaknya pekerja di bawah umur. Dalam hal ini, LST tentunya tidak hanya menyangkut lingkungan hidup, namun juga keselamatan, kesehatan, dan lingkungan kerja. Kita juga perlu memperhatikan regulasi atau

tata kelola di masing-masing perusahaan, misalnya bagaimana menghadapi kondisi kerja yang buruk di pabrik, pemanfaatan ruang yang tidak memadai, harga produk, dan bahan baku yang digunakan.

LST lebih dari sekadar krisis iklim. Hal ini mencakup karyawan, kode etik, atau cara perusahaan melayani masyarakat. Misalnya, apa kode etik kontrak pemasok? Bagaimana kita akan mengauditnya? Hal ini terkait dengan LST. Program CSR (*Corporate Social Responsibility*) juga terkait dengan LST. Bagaimana kita berkontribusi pada komunitas kita? Bagaimana kita membuat kehidupan orang-orang di sekitar kita, pelanggan, dan karyawan kita menjadi lebih baik? Sebagai sebuah bisnis, kami selalu mempertimbangkan bagaimana berkontribusi terhadap pendapatan seluruh pemegang saham. Namun ketika kita berbicara tentang ESG atau keberlanjutan, kita tidak hanya berpikir tentang pemegang saham, melainkan “Bagaimana kita dapat memberi nilai tambah pada kehidupan pelanggan, pemasok, komunitas, dan masyarakat?” Jadi, ESG tidak hanya terfokus pada satu bidang saja, seperti perbaikan aspek lingkungan hidup, namun juga perbaikan aspek sosial dan tata kelola yang akan berdampak pada kehidupan banyak orang di sekitar kita.

Menurut saya, LST telah cukup lama menjadi topik penting. Namun selama beberapa waktu, perusahaan hanya berfokus pada isu-isu yang sangat sempit: “Berapa biaya inventaris kita? Bagaimana dengan biaya aset tetap kita? Bagaimana kita bisa menghasilkan uang?” Oleh karena itu, aspek ini selalu muncul dalam dunia bisnis. Bagaimana dengan lingkungan hidup? Bencana alam seperti banjir, gempa bumi, tsunami, dan naiknya permukaan air laut hanyalah beberapa contohnya. Barangkali tidak ada yang menaruh perhatian atau menekankan aspek tersebut. Menurut pendapat saya, generasi muda kita baru saja mulai mempertimbangkan secara serius bagaimana tindakan mereka berdampak terhadap lingkungan, bagaimana kita meningkatkan kehidupan karyawan kita, dan bagaimana kita memberi manfaat bagi masyarakat. Baru-baru ini isu-isu LST terungkap dan kemudian dunia usaha memahami bahwa jika mereka tidak mengatasi hal tersebut, mereka mungkin akan mengalami kerugian. Karena seperti yang saya katakan, semua permasalahan lingkungan, sosial, dan tata kelola ini berdampak besar pada kerugian finansial. Perusahaan akan mengalami masalah terkait reputasi dan hilangnya pendapatan.



Q: Bagaimana rating dalam pelaporan LST? Apakah ini sangat penting dalam menilai perusahaan?

Imelda M. Orbito: Ada banyak lembaga pemeringkat untuk LST (misalnya, MSCI,

Sustainalytics, dll.), yang serupa dengan pemeringkat keuangan. Namun, lembaga pemeringkat belum diperlukan bagi perusahaan. Saya sering mendengar bahwa investor global yang sebagian besar berasal dari Uni Eropa dan Amerika Serikat akan melihat peringkat LST suatu perusahaan. Sebagian besar investor dari negara-negara ini ingin memahami kinerja pemeringkatan LST suatu perusahaan agar dapat mengambil keputusan yang tepat. Jika perusahaan tidak memprioritaskan LST sekarang, mungkin sudah terlambat; karena pemangku kepentingan akan memperhatikan cara Anda memperlakukan lingkungan, cara Anda memperlakukan karyawan (sumber daya manusia), dan cara Anda memperlakukan komunitas di sekitar Anda. Jika kinerja Anda buruk dalam bidang-bidang tersebut, maka perusahaan Anda akan dianggap tidak berkelanjutan. Saat ini, investor dan masyarakat ingin berinvestasi pada perusahaan yang berkelanjutan, bukan hanya pada perusahaan yang menghasilkan uang. Selain itu, Bursa Efek Indonesia (BEI) berkomitmen untuk mendorong investasi berkelanjutan dan meningkatkan praktik LST di pasar modal Indonesia dengan bekerja sama dengan lembaga pemeringkat LST untuk memberikan skor LST kepada perusahaan-perusahaan tercatat. Dari pemeringkatan tersebut, BEI membentuk indeks bernama IDX ESG Leaders yang terdiri dari sekitar 30 perusahaan terpilih yang memiliki praktik LST yang baik.



Q: Bagaimana praktik LST korporasi di Indonesia sejauh ini?

Imelda M. Orbito: Dalam penerapan LST, diperlukan investasi besar dan banyak biaya. Misalnya, peralihan dari

plastik ke bahan ramah lingkungan akan memakan banyak biaya. Begitu pula dengan karyawan. Saya pikir banyak perusahaan, jika mereka ingin meningkatkan tunjangan karyawan atau membayarnya secara signifikan, ini membutuhkan biaya yang besar. Saya akan kembali ke bagaimana korporasi di Indonesia mempraktikkan LST selama ini. Penerapan praktik LST masih pada tahap awal, hanya karena tidak ada persyaratannya, dan tidak ada yang bisa memastikan apakah laporan LST dapat diverifikasi atau akurat. Investor belum fokus pada praktik-praktik LST; mereka masih berfokus pada pendapatannya.

Banyak Indikator Kinerja Utama (KPI) perusahaan yang saat ini masih berfokus pada aliran pendapatan masing-masing perusahaan, sehingga praktik LST mungkin belum menjadi prioritas. Namun yang saya perhatikan adalah semakin banyak perusahaan yang mencoba terlibat dalam LST. Saat ini mereka lebih terlibat dalam LST dibandingkan beberapa tahun yang lalu. Jadi, dari segi praktik, saya pikir mereka sudah membaik, tapi kita masih belum berada di level yang sama dengan Eropa. Perusahaan-perusahaan di Eropa sudah sangat matang sehingga LST menjadi salah satu bidang yang akan mereka perhatikan ketika berinvestasi.



Q: Apa saja tantangan yang dihadapi dunia usaha di Indonesia dalam melakukan transformasi menuju LST? Dan apa saja peluangnya?

Imelda M. Orbito: Tantangannya selalu

mengenai permodalan. Faktanya, transformasi LST bersifat padat modal dan memerlukan biaya serta investasi yang besar. Biaya dan investasi awal ini tidak serta merta memberikan keuntungan dalam jangka pendek, sebab upaya ini memerlukan waktu bertahun-tahun untuk dapat dilaksanakan sepenuhnya. Misalnya plastik. Jika kita pergi ke Amerika dan melihat kemasan yang digunakan di sana, mereka sudah mengganti bahan kemasannya. Di Asia, masih banyak kemasan yang menggunakan plastik, dan plastik ini berpotensi mencemari laut. Namun bagaimana mungkin mereka bisa langsung berubah tanpa menginvestasikan banyak uang? Mesin dan infrastruktur mereka diarahkan untuk menggunakan plastik. Mereka menggunakan plastik pada tingkat yang dapat dibayar oleh pelanggan. Jika Anda ingin mengubah model bisnis, biaya perubahannya akan lebih tinggi. Apakah pelanggan Anda bersedia membayar sejumlah uang di Asia? Karena (perubahan) ini, perusahaan akan mengenakan biaya lebih banyak dan orang-orang di AS dan Eropa bersedia mengeluarkan uang. Di Indonesia, apakah konsumen mampu membayar sejumlah uang hanya karena perusahaan akan mengubah model bisnisnya? Jadi bagi saya ini semua soal modal. Saya rasa semua orang, terutama generasi muda, sangat ingin mendukung produk ramah lingkungan, infrastruktur ramah lingkungan, dan model bisnis yang baik. Namun apakah kita bersedia membayarnya sekarang? Itulah dilema yang dihadapi perusahaan saat ini. Saya pikir cepat atau lambat, tidak ada jalan kembali. Kita tidak akan pernah bisa kembali menggunakan plastik. Kita tidak akan pernah bisa kembali menggunakan bahan mentah dan produk yang tidak ramah lingkungan. Saya yakin kita tidak akan pernah bisa kembali ke era itu. Jadi, kita selalu ingin memastikan bahwa kita membantu lingkungan, membantu karyawan, dan memiliki tata kelola perusahaan yang baik. Itulah masa depan. Jika perusahaan bersedia mengeluarkan uang dan berinvestasi sekarang, mereka mempunyai peluang berjuang lebih baik dan pendapatan lebih baik di masa depan. Jika mereka menerima perubahan, mereka akan melihat peluang yang lebih besar. Jika mereka mau berinvestasi saat ini, hal tersebut tidak akan mudah karena mungkin memerlukan biaya yang besar, namun di masa depan, mereka akan menjadi pemimpin dalam ranah bidang LST.

Sejujurnya, hal ini tidak hanya terjadi di Indonesia. Saya pikir ini terjadi di Asia; karena jika dilihat dari angkanya, Asia merupakan salah satu kawasan yang paling terkena dampak isu LST. Jika kita berbicara tentang banjir, polusi, atau praktik ketenagakerjaan, sayangnya, Asia masih terkena dampaknya. Artinya, praktik-praktik LST memang ada, namun tidak semua perusahaan bisa langsung mengikutinya. Misalnya, perusahaan minyak dan gas memerlukan jangka waktu yang lebih lama dan upaya yang lebih besar dibandingkan perusahaan lain yang memiliki dampak lebih kecil terhadap lingkungan dan masyarakat untuk sepenuhnya mengintegrasikan LST ke dalam bisnis mereka. Selain itu, karena dana merupakan sumber penting dalam praktik berkelanjutan, pendanaan yang dibutuhkan oleh sektor energi (seperti minyak dan gas) relatif lebih tinggi dibandingkan dengan kebutuhan sektor lain yang tidak terlalu berisiko.

Selain tantangan utama terkait permodalan, terdapat juga tantangan dalam penerapannya di dalam perusahaan itu sendiri di mana banyak perusahaan yang mengalami kesulitan. Karena keberlanjutan bersifat multidisipliner, maka terdapat kebutuhan untuk mengkoordinasikan implementasi di berbagai fungsi dan departemen (misalnya, perusahaan perlu mengadopsi pendekatan yang luas). Mempelajari atau menerapkan keberlanjutan tidak hanya diperlukan pada satu divisi saja. Kurva pembelajaran mengharuskan semua tingkat karyawan dan divisi. Koordinasi ini biasanya sulit dilakukan oleh perusahaan, karena penerapan LST juga memerlukan keterampilan dan pengetahuan. Jadi, mulai dari tingkat dewan, manajemen senior, manajemen menengah, bahkan tingkat staf, semuanya harus memahami pentingnya keberlanjutan dan bagaimana penerapan LST.

Perusahaan memerlukan pemahaman yang luas mengenai isu-isu LST ini, mulai dari penentuan strategi hingga jaminan eksternal untuk pengungkapan keberlanjutan kepada publik. Perusahaan dengan berbagai latar belakang, baik jasa keuangan, konsumen, energi dan sumber daya, serta industri lainnya perlu memiliki keyakinan terhadap perjalanan keberlanjutan mereka, serta berbagai fungsi internal mereka, baik itu hukum, pembiayaan ramah lingkungan, pelaporan keberlanjutan, strategi, dan lain-lain. Kami di Deloitte Indonesia memahami bahwa sektor swasta di Indonesia harus berpartisipasi dalam mengatasi permasalahan lingkungan, sosial dan tata kelola; oleh karena itu, kami sangat mendukung sektor ini dalam perjalanan berkelanjutannya. Kami memastikan bahwa perusahaan melakukan yang terbaik dalam pelaporan data LST dan memastikan bahwa mereka memenuhi standar keberlanjutan dan kepatuhan terhadap risiko peraturan, mengambil bagian dalam upaya dekarbonisasi, menyadari risiko iklim, dan melakukan uji tuntas LST.



Q: Bagaimana Anda melihat prospek pengembangan LST di Indonesia?

Imelda M. Orbito: Saya yakin semakin banyak pemangku kepentingan, dunia usaha, komunitas, dan masyarakat yang menyadari pentingnya LST untuk masa depan. Tidak ada kata menyerah. LST adalah masa depan kita. Dan jika perusahaan tidak benar-benar mengupayakan hal tersebut, maka hal ini akan menimbulkan kerugian besar bagi mereka di kemudian hari. Jadi, ini suatu keharusan. Saya pikir ini adalah suatu keharusan

bagi kita dan perusahaan untuk tumbuh dan menjadi *sustainable*. Kita harus mampu mengidentifikasi dan melihat LST sebagai penciptaan nilai, nilai bagi organisasi, nilai bagi lingkungan, dan nilai bagi berbagai bidang lainnya.



Q: Dan pertanyaan terakhir, adakah saran yang bisa Anda bagikan kepada dunia usaha atau organisasi atau institusi agar berhasil menerapkan LST?

Imelda M. Orbito: Saat ini perusahaan-perusahaan harus benar-benar berfokus pada LST dan mereka yang tidak mengadopsinya akan menghadapi risiko. Ini bisa jadi mahal dan memakan waktu. Namun, penting sekali untuk mulai mengedukasi para pemimpin dan orang-orang di dalam perusahaan. Mereka perlu menetapkan landasan bersama agar perusahaan dan pemangku kepentingan utamanya memahami LST. Kemudian, mereka perlu mengidentifikasi risiko dan peluang keberlanjutan, lalu memprioritaskan dan memvalidasi isu-isu penting LST yang harus menjadi fokus utama dan menyiapkan peta jalan untuk melaksanakan transformasi LST.

Selain itu, perusahaan harus menetapkan proses pengumpulan data untuk mengidentifikasi data dasar dan memantau kinerja LST. Setelah itu, perusahaan dapat menentukan tujuan dan target untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja LST, serta mengembangkan strategi dan rencana aksi LST yang selaras dengan visi dan misi perusahaan. Terakhir, perusahaan harus mengungkapkan visi, strategi, dan kinerja LST dalam laporan keberlanjutan dan melibatkan pihak ketiga untuk memberikan jaminan independen mengenai laporan dan data LST. Deloitte Indonesia dapat membantu klien di setiap tahapan proyek implementasi LST mereka.

Mengapa Lingkungan, Sosial dan Tata Kelola penting?

Sebagai tanggapan terhadap meningkatnya kesadaran bahwa dampak lingkungan dan sosial akan mempengaruhi aspek keuangan bisnis dalam jangka panjang, para pemimpin global, pelaku bisnis, dan akademisi telah sepakat untuk bekerja sama dalam mengurangi emisi karbon global hingga 'net zero' pada sekitar tahun 2050. Upaya ini harus dilakukan untuk membatasi kenaikan suhu global hingga paling lambat 1,5°C pada tahun 2025. Hal ini berarti semua sektor harus secara radikal mengubah cara mereka melakukan bisnis pada tahun 2025. Dunia usaha harus mengambil peran utama dengan memasukkan upaya lingkungan dan sosial ke dalam proses bisnis mereka, serta mengembangkan pelaporan LST sebagai bagian dari komunikasi mereka untuk mendorong transparansi dalam data dan upaya LST mereka.

Namun, LST terkadang dipandang sebagai penghambat keuntungan. Banyak dunia usaha tidak tahu harus mulai dari mana atau tidak melihat hasil yang diinginkan dari investasi mereka, karena mereka menganggap penerapan LST memerlukan investasi besar. Kurangnya kriteria standar mengenai apa yang membuat suatu investasi berkelanjutan juga menjadi perhatian. Ini adalah kesalahpahaman yang tersebar luas.

Dengan memasukkan LST ke dalam rencana perusahaan, ini dapat meningkatkan keuntungan, mengurangi biaya, dan memosisikan mereka di masa depan di mata masyarakat yang lebih sadar lingkungan. Alhasil, semakin banyak perusahaan yang mulai memasukkan LST ke dalam operasi dan rencana bisnis harian mereka. Oleh karena itu, LST telah berkembang menjadi kebutuhan strategis bagi dunia usaha saat mereka bersiap menghadapi masa depan. Dunia saat ini sedang menghadapi permasalahan lingkungan dan sosial ekonomi yang rumit dan berat. Risikonya semakin meningkat. Oleh karena itu, LST yang berbasis nilai dapat menjadi perhatian bagi setiap bisnis.

Evolusi LST

Sudut pandang LST mengevaluasi cara organisasi menangani risiko dan peluang yang disebabkan oleh perubahan faktor sosial, ekonomi, dan lingkungan. Beberapa faktor ini telah dicatat dalam kerangka strategis dan/atau peraturan sebelumnya yang berfokus pada keberlanjutan, seperti:

Lingkungan, Kesehatan, dan Keselamatan (*Environmental, Health, and Safety*)

Organisasi-organisasi di Amerika Serikat mulai memikirkan cara untuk menggunakan undang-undang pada tahun 1980an untuk mengelola atau meminimalkan polusi (dan eksternalitas berbahaya lainnya) yang disebabkan oleh upaya mencapai pertumbuhan ekonomi. Meskipun kemajuan besar telah dicapai saat ini, upaya-upaya tersebut juga bertujuan untuk meningkatkan standar ketenagakerjaan dan keselamatan karyawan.

Keberlanjutan Perusahaan (*Corporate Sustainability*)

Pada tahun 1990an, EHS berkembang menjadi sebuah gerakan yang dikenal dengan nama Keberlanjutan Perusahaan atau *Corporate Sustainability*. Hal ini disebabkan oleh tim manajemen tertentu yang ingin berkonsentrasi untuk menurunkan dampak lingkungan perusahaan mereka melebihi apa yang diwajibkan oleh undang-undang. Secara umum diakui bahwa tim manajemen sering menggunakan keberlanjutan perusahaan sebagai teknik pemasaran untuk membesar-besarkan (atau menyematkan) upaya dan dampak lingkungan; praktik ini dikenal sebagai "*greenwashing*".

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*)

Gerakan keberlanjutan perusahaan mulai memasukkan konsep tentang bagaimana bisnis dapat mengatasi tantangan sosial pada awal tahun 2000an. Istilah "tanggung jawab sosial perusahaan" atau "*corporate social responsibility*" kemudian akan digunakan untuk menggambarkan hal ini. Bagian penting dari Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) adalah filantropi perusahaan, sementara beberapa pihak yang menentangya berpendapat bahwa manfaat pajak membuat donasi uang sama menariknya dengan dampak ekonomi program ini terhadap penerimanya. Kesukarelaan di kalangan para pekerja merupakan ciri lain dari CSR.

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*)

Pada tahun 2015, Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan diadopsi oleh seluruh negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk memberikan cetak biru bersama bagi perdamaian dan kemakmuran bagi manusia dan planet ini, baik di masa kini maupun di masa depan. Istilah "Pembangunan Berkelanjutan" dipahami sebagai "pembangunan" yang memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Pada intinya, 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) menyerukan aksi global yang kolaboratif untuk mengatasi kemiskinan, meningkatkan kesehatan dan pendidikan, mengurangi ketidakesetaraan, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan mengatasi perubahan iklim sembari menjaga lautan dan hutan kita.

Lingkungan, Sosial dan Tata Kelola (*Environmental, Social and Governance*)

Pada akhirnya, pada akhir tahun 2010-an dan memasuki tahun 2020-an, gerakan ini menjadi lebih proaktif (dan bukan reaktif). Istilah Lingkungan, Sosial dan Tata Kelola (LST) atau *Environmental, Social and Governance* (ESG) telah berkembang menjadi kerangka kerja luas yang mencakup topik-topik penting termasuk dampak lingkungan dan sosial serta bagaimana struktur tata kelola dapat diubah untuk meningkatkan kesejahteraan pemangku kepentingan.

Beberapa faktor utama LST membantu perusahaan mengevaluasi strategi bisnis, dampak sosial, dan keberlanjutan serta seberapa baik praktik lingkungan, sosial, dan tata kelola diintegrasikan ke dalam operasi. LST terdiri dari tiga bagian: lingkungan hidup, sosial, dan tata kelola. Di bawah ini adalah contoh faktor-faktor utama yang perlu menjadi perhatian perusahaan ketika menerapkan LST.²

2 "ESG Investing and Analysis". CFA Institute.

Lingkungan	Sosial	Tata Kelola
Perubahan iklim	Kesejahteraan karyawan	Strategi dan investasi
Emisi karbon	Kesetaraan gender	Komposisi dewan
Polusi	Keterlibatan karyawan	Pengungkapan perusahaan
Keanekaragaman hayati	Hak asasi Manusia	Anti korupsi dan penyuaapan
Efisiensi energi	Standar ketenagakerjaan	Kompensasi eksekutif
Pengelolaan sampah	Hubungan masyarakat	Kontribusi politik
	Perlindungan data dan privasi	Struktur komite audit
	Kepuasan pelanggan	

Lanskap

Integrasi konsep-konsep LST ke dalam suatu bisnis terbukti berhasil meningkatkan nilai suatu perusahaan secara keseluruhan. Dunia usaha dapat menarik dan mempertahankan investor dan klien dengan memprioritaskan keberlanjutan dan praktik bisnis yang beretika. Mereka dapat membantu menciptakan masa depan yang adil dan berkelanjutan bagi semua orang. Kesimpulannya, LST tidak hanya merupakan kebutuhan etis namun juga merupakan keputusan ekonomi yang cerdas di lingkungan di mana kita berada saat ini. Lebih dari sepertiga dari perkiraan total *Assets Under Management* (AUM) sebesar USD140,5 triliun akan terdiri dari aset-aset LST, yang diperkirakan akan mencapai USD50 triliun pada tahun 2025.³

Investasi berbasis LST di Indonesia berkembang pesat. Pada 22 Mei 2022, Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat AUM reksa dana berbasis LST telah mencapai Rp2,3 triliun (USD153 juta). Survei yang dilakukan Katadata Insight Center (KIC) pada pertengahan tahun 2022 mengungkapkan bahwa 66,1% investor Indonesia lebih memilih membeli saham berbasis LST dibandingkan saham non-LST. Hal ini menunjukkan bahwa minat investor Indonesia terhadap LST semakin meningkat dan harus dilihat sebagai pendorong bagi dunia usaha untuk menjadi lebih berkelanjutan dalam praktiknya.

Lembaga-lembaga internasional telah menyatakan minatnya terhadap pengembangan LST di sektor bisnis Indonesia, termasuk sektor energi. Dengan memperkuat upaya mereka untuk mempertahankan praktik pengelolaan lingkungan kelas dunia dan upaya mitigasi risiko, perusahaan dapat memperoleh peringkat obligasi tingkat investasi dan dengan demikian membayar kupon obligasi yang lebih rendah, seperti yang terjadi pada PT Freeport Indonesia pada bulan April 2022, yang meluncurkan obligasi

global senilai US\$3 miliar yang mengalami kelebihan permintaan, setelah perusahaan berhasil menurunkan emisi di lokasi penambangannya di Grasberg, Mimika, Papua. Salah satu inisiatifnya adalah mengganti kendaraan operasionalnya dengan kereta listrik yang memiliki sepuluh gerbong berkapasitas 110 ribu ton. Upaya ini diharapkan dapat mengurangi 80 ribu ton emisi CO2 setiap tahunnya. Perusahaan ini telah mencapai 23% dari target komitmen pengurangan emisi sebesar 30% pada tahun 2030.⁴ Perusahaan energi lain berupaya mencapai komitmen serupa. Salah satunya adalah perusahaan induk pertambangan milik negara, MIND ID, yang memitigasi upaya efisiensi operasional melalui digitalisasi, konsolidasi, dan upaya lain untuk mengimbangi jejak karbonnya.



³ "Sustainable Future Study: Insights on Where ESG Investing is Headed". Bloomberg Media Studios & Mudabala. 2022.

⁴ "Pengurangan Karbon Jadi Kebutuhan Bisnis". Investor Daily. 15 Februari 2023.

Urgensi mendasar dan alasan untuk lebih mempertimbangkan LST

Beberapa tahun terakhir telah menunjukkan perlunya semakin mendesaknya pelibatan LST dalam pengambilan keputusan bisnis strategis. Organisasi-organisasi, khususnya yang bergerak di sektor perbankan dan jasa keuangan, mulai menyadari pentingnya LST dalam membangun kepercayaan para pemangku kepentingan dan mencapai keberhasilan jangka panjang. Selain itu, integrasi faktor-faktor LST diharapkan dapat meningkatkan keberlanjutan pendorong utama yang berdampak pada *Rol (Return on Investment)* perusahaan. Karyawan, pelanggan, investor, pemberi pinjaman, dan regulator pemerintah menjadi pendorong utama bagi organisasi untuk mengambil tindakan nyata sehingga operasi bisnis mereka dapat mengatasi isu-isu seperti perubahan iklim, keselamatan kerja, dan kesetaraan kesempatan.⁵ Berikut adalah beberapa faktor utama mengapa organisasi perlu mempertimbangkan dan mengintegrasikan pilar-pilar LST secara cermat dalam mengambil keputusan bisnis mereka:



4 dari 5 risiko utama global selama periode 10 tahun adalah risiko lingkungan hidup

Menurut Global Risk Report 2024, selama periode 10 tahun ke depan, risiko lingkungan seperti kejadian cuaca ekstrem dan hilangnya keanekaragaman hayati serta runtuhnya ekosistem, masih menjadi risiko utama yang dihadapi dunia, sehingga menimbulkan ancaman signifikan terhadap stabilitas sosial dan ekonomi.⁶



Masalah lingkungan dan sosial menghambat pemulihan nasional

Berdasarkan studi BAPPENAS dan Universitas Indonesia, pandemi COVID-19 mengakibatkan terganggunya rantai pasok pangan, pengentasan kemiskinan, upaya mengurangi pengangguran, kesenjangan sosial, dan masyarakat rentan, serta permasalahan limbah umum dan limbah medis.⁷



Mengadopsi LST menawarkan peluang untuk tumbuh secara internal dan memperluas pasar baru

Menyelaraskan LST dengan strategi bisnis dapat memacu keunggulan kompetitif jangka panjang melalui inovasi, diferensiasi merek, loyalitas konsumen, efisiensi biaya, daya tarik, dan retensi talenta.¹⁰



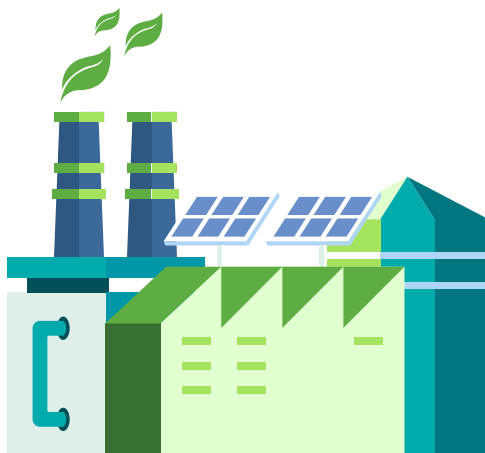
Meningkatnya kekhawatiran dan harapan pemangku kepentingan terhadap perilaku perusahaan

Permasalahan lingkungan dan sosial semakin meningkat, dan pada saat yang sama kekhawatiran dari konsumen, investor, dan pemangku kepentingan lainnya juga meningkat.⁸ Keberhasilan Presidensi G20 Indonesia telah meningkatkan minat investor asing untuk berinvestasi di negara ini baik di pasar publik maupun swasta. Hal ini menuntut lembaga keuangan untuk memperkuat tata kelola di kalangan pelaku usaha.⁹



Perlindungan nilai untuk bisnis

Penerapan keberlanjutan dapat meminimalkan biaya dan risiko yang terkait dengan risiko reputasi dan izin sosial untuk beroperasi, risiko operasional dan terganggunya kondisi makro ekonomi, konteks sosial dan lingkungan, serta ketahanan organisasi.¹¹



5 Lau, Jude. "The increasing importance of being an ESG-centric business". HLB Global. 2022.

6 "The Global Risk Report". World Economic Forum. 10 Januari 2024.

7 "Indonesia's Agenda on Sustainable Recovery from COVID-19 Pandemic". LPEM FEB UI and BAPPENAS. December 2020.

8 "Embedding sustainability into business strategy and core operations: A view from South Africa". Deloitte South Africa. Februari 2021.

9 "Saatnya Governance di Pasar Finansial Jadi Perhatian Serius". Investor Daily. 15 Februari 2023.

10 "Embedding sustainability into business strategy and core operations: A view from South Africa". Deloitte South Africa. Februari 2021.

11 Ibid.



Faktor lain yang datang dari berbagai pemangku kepentingan mengenai isu-isu LST, menimbulkan harapan besar bagi perusahaan untuk mengatasinya. Sebuah studi dari Thomson Reuters mengungkapkan bahwa pada tahun 2023, LST tidak hanya sekadar "pelaporan", karena LST kini dikaitkan dengan kinerja keuangan dan kesuksesan finansial jangka panjang perusahaan, termasuk mengurangi risiko ekonomi dan membuka peluang investasi.¹² Sebagai contoh, lembaga keuangan yang mengejar kinerja keuangan yang tinggi dan tujuan keberlanjutan strategis pada saat bersamaan tidak akan menghadapi konflik; sebaliknya, ketika didorong oleh kepemimpinan yang kuat dan konsisten, kedua tujuan tersebut akan saling memperkuat satu sama lain. Dilihat dari manfaatnya, penyertaan LST menghadirkan potensi besar bagi perusahaan untuk tumbuh dan mengembangkan pasar mereka, sekaligus meminimalkan biaya dan risiko seperti risiko reputasi dan operasional serta membantu membangun ketahanan perusahaan saat ini dan di masa mendatang.

Mengapa memberdayakan LST penting bagi perusahaan Anda?

Baik investor maupun konsumen mempunyai ekspektasi yang tinggi terhadap penerapan praktik LST yang dilakukan perusahaan. Konsumen dan investor kini semakin khawatir terhadap isu-isu seperti dampak perusahaan terhadap lingkungan dan iklim,

kesejahteraan karyawan, antikorupsi, dan privasi data. Selain investor dan konsumen, tekanan mulai datang dari regulator; karena undang-undang dan peraturan terkait LST mulai meningkat jumlahnya, seiring dengan penegakannya. Kemungkinan besar dalam waktu dekat, penerapan LST akan menjadi hal yang tidak dapat dihindari dan wajib dilakukan oleh dunia usaha/organisasi. LST tidak hanya akan dilihat sebagai tren yang berlalu begitu saja; sebaliknya, LST telah membuka jalan untuk menjadi standar baru bagi dunia usaha/organisasi.

Sebagai catatan, perusahaan yang menerapkan dan mengikuti prinsip-prinsip LST telah menunjukkan produktivitas karyawan dan pertumbuhan keuangan yang lebih tinggi, volatilitas yang rendah, dan berkurangnya intervensi hukum (mulai dari denda dan sanksi).¹³ Sementara itu, perusahaan-perusahaan yang tidak memprioritaskan penerapan LST lebih mudah berubah dan mengalami kejadian-kejadian seperti penipuan akuntansi, pemogokan buruh, dan denda/sanksi dari regulator. Oleh karena itu, penerapan LST perlu dilihat sebagai pilihan yang positif dan menguntungkan bagi perusahaan/organisasi. Beberapa faktor mengapa kita harus mulai menerapkan prinsip-prinsip LST di organisasi kita dari sudut pandang pemangku kepentingan dirangkum di bawah ini:

¹² "The 2023 State of Corporate ESG: How companies are embracing ESG for resilience and growth". Thomson Reuters. 7 November 2023.

¹³ "ESG And Financial Performance: Uncovering the Relationship by Aggregating Evidence From 1,000 Plus Studies Published Between 2015 – 2020". New York University. 2021.



Investor

Ketika mereka berupaya memanfaatkan modal mereka untuk berkontribusi terhadap penciptaan masa depan

yang lebih berkelanjutan, para investor, mulai dari *individual saver* hingga institusi besar, mengalokasikan persentase portofolio mereka yang terus meningkat untuk strategi berkelanjutan. Sebab kinerja LST yang lebih baik berkorelasi dengan keuntungan yang lebih tinggi, penurunan risiko, dan kelangsungan hidup perusahaan dalam jangka panjang, investor menjadi semakin tertarik pada faktor-faktor LST ketika menilai suatu bisnis. Para peneliti memperkirakan investasi LST akan meningkat dua kali lipat dalam tiga tahun ke depan, karena semakin banyak investor yang menyelaraskan portofolionya dengan prinsip-prinsip LST.¹⁴ Oleh karena itu, perusahaan-perusahaan mulai membuat pengungkapan LST yang nyata dan tepat, sebab investor menjadi semakin terlibat dalam cara perusahaan menangani risiko tanggung jawab lingkungan dan sosial mereka. Pengungkapan LST membantu memberikan pengetahuan kepada investor yang memungkinkan mereka membuat pilihan investasi yang bijaksana. Semakin banyak investor yang memutuskan bagaimana mengalokasikan portofolionya atau mengembangkan peraturan investasi berdasarkan informasi LST seiring dengan semakin spesifiknya transparansi yang mengontrol aktivitas perdagangan dan pemungutan suara.



Konsumen

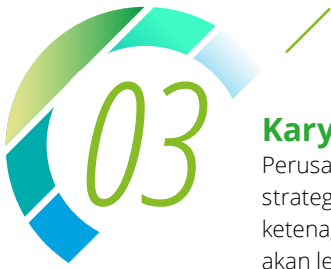
Ketika konsumen menjadi lebih sadar akan praktik-praktik LST, perubahan permintaan konsumen

mulai berdampak pada keuntungan bisnis. Konsumen menuntut transparansi yang lebih besar dari produsen dan mempunyai ekspektasi yang lebih tinggi terhadap produsen untuk bertindak secara etis dan bertanggung jawab. Investasi yang mencakup pertimbangan LST sering kali digunakan oleh sekitar sepertiga generasi milenial.¹⁵ Generasi milenial lebih memilih membayar lebih untuk barang dan jasa yang dianggap berkelanjutan atau berasal dari organisasi yang mempraktekkan tanggung jawab sosial dan kesadaran lingkungan. Dibandingkan sepuluh tahun yang lalu, barang-barang ramah lingkungan memiliki harga yang lebih terjangkau. Oleh karena itu, mendorong penyelarasan nilai-nilai LST dengan berbagai pemangku kepentingan, karyawan, konsumen, dan vendor akan bermanfaat dalam menentukan kelangsungan jangka panjang dan pertumbuhan nilai bagi bisnis yang berbasis konsumen.



14 "ESG Investment Expected to More Than Double in the Next Three Years". Dow Jones. 7 September 2022.

15 "Millennials spurred growth in sustainable investing for years. Now, all generations are interested in ESG options". CNBC. 21 Mei 2021.



Karyawan

Perusahaan dengan strategi LST dan hubungan ketenagakerjaan yang kuat akan lebih produktif. Program

penghargaan yang lebih adil dapat mendorong lingkungan yang ramah dan keterlibatan staf, sehingga akan meningkatkan hasil. Selain itu, 79% pekerja mengharapkan bahwa perusahaan mereka akan mengambil tindakan atas permasalahan sosial yang signifikan. Kinerja LST akan menjadi semakin penting dalam melibatkan dan mempertahankan sumber daya manusia, terutama seiring dengan meningkatnya proporsi generasi milenial dan generasi Z dalam angkatan kerja global.¹⁶

Selain itu, karyawan saat ini semakin sadar akan hak Perlindungan Data Pribadi (PDP). Mengambil pelajaran dari kasus-kasus pelanggaran PDP di masa lalu, yang antara lain disebabkan oleh tidak adanya peraturan PDP yang tunggal dan komprehensif, Indonesia kini memiliki Undang-Undang PDP sendiri – UU Perlindungan Data Pribadi. Karyawan adalah aset terbesar perusahaan dan salah satu kerentanan terbesarnya terkait data pribadi. "Unsur manusia"—seperti kata sandi yang dicuri, personel yang terjerumus ke dalam penipuan *phishing*, dan kesalahan penggunaan—merupakan penyebab 82% pelanggaran pada tahun 2021.¹⁷ Penerapan UU PDP secara efektif, dikombinasikan dengan identifikasi dan mitigasi risiko potensi pelanggaran PDP tidak hanya akan menjamin perlindungan data konsumen yang lebih aman dan terjamin, namun juga secara positif meningkatkan reputasi dan kredibilitas perusahaan di benak masyarakat.



Regulator

Pada 12 November 2022, Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, meluncurkan Kerangka dan

Panduan Lingkungan, Sosial dan Tata Kelola (LST) untuk dukungan dan fasilitas pemerintah dalam pembiayaan infrastruktur.¹⁸ Implementasi LST akan dilakukan secara bertahap hingga tahun 2025.

Pemerintah Indonesia melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menetapkan pedoman Laporan Keberlanjutan korporasi yang harus mengikuti kerangka *Global Reporting Initiative* (GRI) sebagaimana tertuang dalam peraturan OJK yang diterbitkan pada tahun 2017. Terdapat perusahaan yang menggabungkan GRI pedoman dengan POJK Nomor 51/POJK.03/2017 tentang penerapan keuangan berkelanjutan pada lembaga jasa keuangan, emiten, dan perusahaan publik. Dalam aturan tersebut, OJK menyatakan bahwa untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang mampu menjaga stabilitas perekonomian dan inklusif, diperlukan sistem perekonomian nasional yang mengedepankan aspek LST. Peraturan OJK mengatur tentang penerapan keuangan berkelanjutan bagi jasa keuangan, emiten, dan perusahaan publik yang diatur oleh OJK. Tidak dapat dihindari bahwa sektor-sektor lain akan tunduk pada peraturan serupa di masa depan sebagai tindak lanjut dari agenda infrastruktur Presidensi G20 Indonesia, yaitu mengurangi emisi karbon global ke 'net zero' pada tahun 2060.

Selain itu, pemerintah Indonesia juga berencana menerapkan pajak karbon sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan. Undang-undang ini menetapkan harga pajak karbon terendah adalah Rp30 per kilogram (kg) setara karbon dioksida.¹⁹ Penetapan pajak karbon di Indonesia akan menggunakan skema *cap and tax* atau berdasarkan batasan emisi. Terdapat dua mekanisme yang bisa digunakan di Indonesia, yaitu: menetapkan batasan emisi yang diperbolehkan untuk setiap industri atau dengan menentukan tarif pajak yang harus dibayar untuk setiap unit tertentu. Secara umum, skema *cap and tax* mengadopsi jalan tengah antara skema pajak karbon dan *cap-and-trade* yang umum digunakan di banyak negara.

16 "ESG As a Workforce Strategy". MarshMcLennan. Mei 2020.

17 "Data Privacy and ESG Risk: 7 Key Questions Every Company Needs to Address". Sustainalytics. 5 Oktober 2022.

18 "Peluncuran Kerangka Kerja dan Manual ESG Wujud Komitmen Indonesia Terhadap Investasi Hijau dan Berkelanjutan". Kementerian Keuangan RI. 12 November 2022.

19 "Pajak Karbon di Indonesia: Upaya Mitigasi Perubahan Iklim dan Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan". Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI. 2 Desember 2021.



Studi kasus: Penerapan praktik-praktik LST yang dilakukan perusahaan-perusahaan di Indonesia saat ini

Terdapat banyak perusahaan di Indonesia, baik milik negara maupun swasta, yang kurang lebih telah mengintegrasikan LST ke dalam bisnis mereka. Perusahaan-perusahaan ini tersebar di berbagai sektor, termasuk bank dan lembaga keuangan, energi, pertanian, FMCG, pertambangan, dan banyak lainnya. Misalnya, Himbara (Himpunan Bank Milik Negara), sebutan untuk empat bank milik negara di Indonesia, mendorong penerapan prinsip-prinsip LST melalui strategi komunikasi "Role Modeling" dengan memberikan contoh tindakan nyata untuk menerapkan prinsip-prinsip berkelanjutan, sehingga praktik ini dapat diikuti oleh pemangku kepentingan serta perusahaan lain. Strategi tersebut mencakup target penyaluran 1,75 juta bibit pohon produktif kepada pelanggan dan peningkatan penggunaan kendaraan listrik untuk operasional usaha. Dari aspek sosial, perbankan terus memberdayakan masyarakat Indonesia untuk meningkatkan akses mereka terhadap layanan keuangan formal. Misalnya, salah satu bank dengan jaringan terluas di Indonesia telah menjangkau seluruh wilayah Indonesia melalui 8.993 kantor cabang dan 221.531 *e-channel* atau setara dengan 75% seluruh desa di Indonesia. Bank ini juga meningkatkan penerapan tata kelola yang baik dan mengacu pada standar internasional. Evaluasi secara berkala terus dipantau, salah satunya dengan melihat ESG Rating (yaitu MSCI Rating).

Selain itu, salah satu perusahaan migas terbesar di Indonesia juga telah menerapkan LST dalam bisnisnya. Sebagai landasan dalam menjalankan praktik LST, perusahaan ini meluncurkan kebijakan terkait LST seperti Kebijakan Keberlanjutan, Kebijakan Hak Asasi Manusia, Kebijakan Berperilaku Saling Menghargai di Tempat Kerja, dan lain-lain yang akan menjadi pedoman penerapan LST di masa depan. Perusahaan ini juga berencana membentuk Komite Keberlanjutan untuk memastikan kebijakan LST diterapkan dengan baik di seluruh proses bisnis. Dalam rangka mengatasi perubahan iklim, perusahaan terus mengurangi emisi karbon dari produksi dan konsumsi energi serta melakukan langkah-langkah untuk melindungi ekosistem dan keanekaragaman hayati di setiap wilayah operasinya. Pada tahun 2020, perusahaan berhasil menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK) sebesar 27% dibandingkan *baseline* tahun 2010. Perusahaan ini bertujuan untuk semakin mencapai target penurunan 30% total emisi GRK

pada tahun 2030. Dari sisi sosial, perusahaan ini juga terus memperkuat kebijakan kesehatan dan keselamatan kerja dalam upaya mencapai nihil kecelakaan di masa depan. Program pemberdayaan juga dikembangkan untuk memperkuat hubungan dengan masyarakat lokal di seluruh wilayah operasional. Selain itu, program rekrutmen dan pengembangan karyawan, termasuk membuka jalan bagi penyandang disabilitas, juga telah ditetapkan. Dari sisi aspek tata kelola, perusahaan meluncurkan New Clean Charter pada bulan Juni 2020. Hal ini dilakukan sebagai upaya penerapan ISO 37001:2016 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan yang meliputi menghindari konflik kepentingan, tidak memberikan toleransi terhadap penyuapan, menjunjung tinggi manajemen yang profesional, amanah dan berintegritas. Piagam ini dimaksudkan untuk mempromosikan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) yang kuat di seluruh organisasi.

Namun, penerapan LST di berbagai industri mungkin berbeda-beda. Menurut Imelda Orbito, Deloitte Indonesia Audit & Assurance Partner and Sustainability & Climate Leader, perusahaan minyak dan gas akan membutuhkan jangka waktu yang lebih lama dan upaya yang lebih besar, misalnya, untuk sepenuhnya mengintegrasikan LST ke dalam bisnis mereka. Selain itu, karena dana merupakan sumber penting dalam praktik berkelanjutan, kebutuhan pendanaan untuk energi (termasuk minyak dan gas) relatif lebih besar dan mahal. Dengan kata lain, fokus sebenarnya adalah pada transisi menuju LST yang padat modal atau di mana diperlukan investasi besar pada LST. Selain itu, sebab penerapan LST memerlukan jangka waktu yang lama, investasi dan pengeluaran awal belum tentu menghasilkan keuntungan dalam waktu dekat. Selain kesulitan terkait permodalan, banyak perusahaan juga menghadapi tantangan ketika menerapkan LST di seluruh organisasi. Implementasi LST memerlukan kolaborasi dari seluruh dunia usaha karena permasalahan multisektoralnya. Peningkatan kapasitas terkait LST diperlukan di semua departemen dan di semua tingkatan pegawai, karena pengetahuan dan kemampuan di bidang LST sangat penting bagi mereka untuk dapat mengimplementasikan LST dengan baik. Oleh karena itu, setiap orang mulai dari tingkat dewan hingga ke bawah termasuk manajemen senior, manajemen menengah, dan tingkat pekerja harus memahami nilai keberlanjutan dan mengetahui cara mengintegrasikan aspek-aspek LST ke dalam pekerjaan mereka sehari-hari.

Mengintegrasikan Lingkungan, Sosial dan Tata Kelola ke dalam bisnis Anda

Sektor investasi semakin peduli terhadap tantangan-tantangan terkait lingkungan, sosial, dan tata kelola perusahaan (LST). Investor kini mendorong para pemimpin perusahaan untuk meningkatkan langkah-langkah keberlanjutan mereka yang pada akhirnya akan meningkatkan kinerja keuangan perusahaan dan memberikan dampak positif yang lebih besar terhadap lingkungan dan masyarakat secara umum. Perusahaan-perusahaan berada di bawah tekanan yang semakin besar dari berbagai pemangku kepentingan untuk mengadopsi pendekatan proaktif dalam mengelola risiko dan peluang LST sebagai bagian dari strategi perusahaan mereka. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa LST dan kinerja bisnis ini saling terkait dan konsisten dengan tuntutan investor. Berdasarkan survei PT Deloitte Konsultan Indonesia dan Global Reporting Initiative (GRI) untuk para CEO di Indonesia, 8 dari 10 CEO percaya bahwa LST semakin penting untuk segera dibahas, sebanyak 73% di antaranya mendorong dimasukkannya topik-topik LST ke dalam rapat dewan.²⁰ Kinerja LST yang lebih tinggi dalam suatu perusahaan kemungkinan besar akan menghasilkan hasil keuangan, retensi talenta, dan pengembangan nilai jangka panjang yang lebih baik. Sebab meningkatnya investasi pada LST dan keberlanjutan saat ini, perusahaan harus bertindak cepat untuk memenuhi kebutuhan investor institusi akan pengungkapan LST yang transparan dan menyeluruh.

Selanjutnya, pada bulan November 2023, Presidensi *Conference of Parties* ke-28 (COP28), yang diselenggarakan di Dubai, menjadi COP pertama di mana para Pihak secara kolaboratif membahas penyebab dan konsekuensi perubahan iklim.

Menetapkan tindakan ambisius yang diperlukan untuk menjaga agar target 1,5°C dalam Perjanjian Paris tetap tercapai, diskusi tersebut menyoroti target baru untuk beralih dari semua bahan bakar fosil untuk mencapai emisi nol bersih pada tahun 2050, mempercepat “target pengurangan emisi yang ambisius dan berskala ekonomi”, menaikkan tiga kali lipat energi terbarukan dan dua kali lipat efisiensi energi pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan pendanaan adaptasi, dan menciptakan momentum menuju reformasi arsitektur keuangan global.²¹ Konsensus Uni Emirat Arab (UEA) yang disepakati ini, menandai pergeseran bersejarah dari ekonomi bahan bakar fosil, memastikan bahwa putaran kontribusi yang ditentukan secara nasional atau *nationally determined contributions* (NDCs) berikutnya, yang akan diserahkan pada COP30 pada tahun 2025, dapat bersifat ambisius, inklusif, dan adil.²²

Sebagai tanggapannya, bisnis perlu mulai mengembangkan dan menerapkan rencana untuk mengurangi emisi gas rumah kaca sebagai bagian dari kontribusi mereka terhadap target global dan nasional, sekaligus memastikan keamanan masyarakat dan lingkungan di seluruh rantai pasokannya. Bisnis yang ingin mengevaluasi keberhasilan, membuat perbedaan, dan mempersiapkan diri di masa depan terhadap pengetatan peraturan dalam sepuluh tahun ke depan harus bertindak sekarang juga dengan mengadopsi dan menerapkan perencanaan dan kebijakan yang tepat.

20 “PT Deloitte Konsultan Indonesia and Global Reporting Initiative Survey: Survey on the Role of CEOs in Advancing

21 “COP28 The UAE consensus brochure”. COP28. 2023.

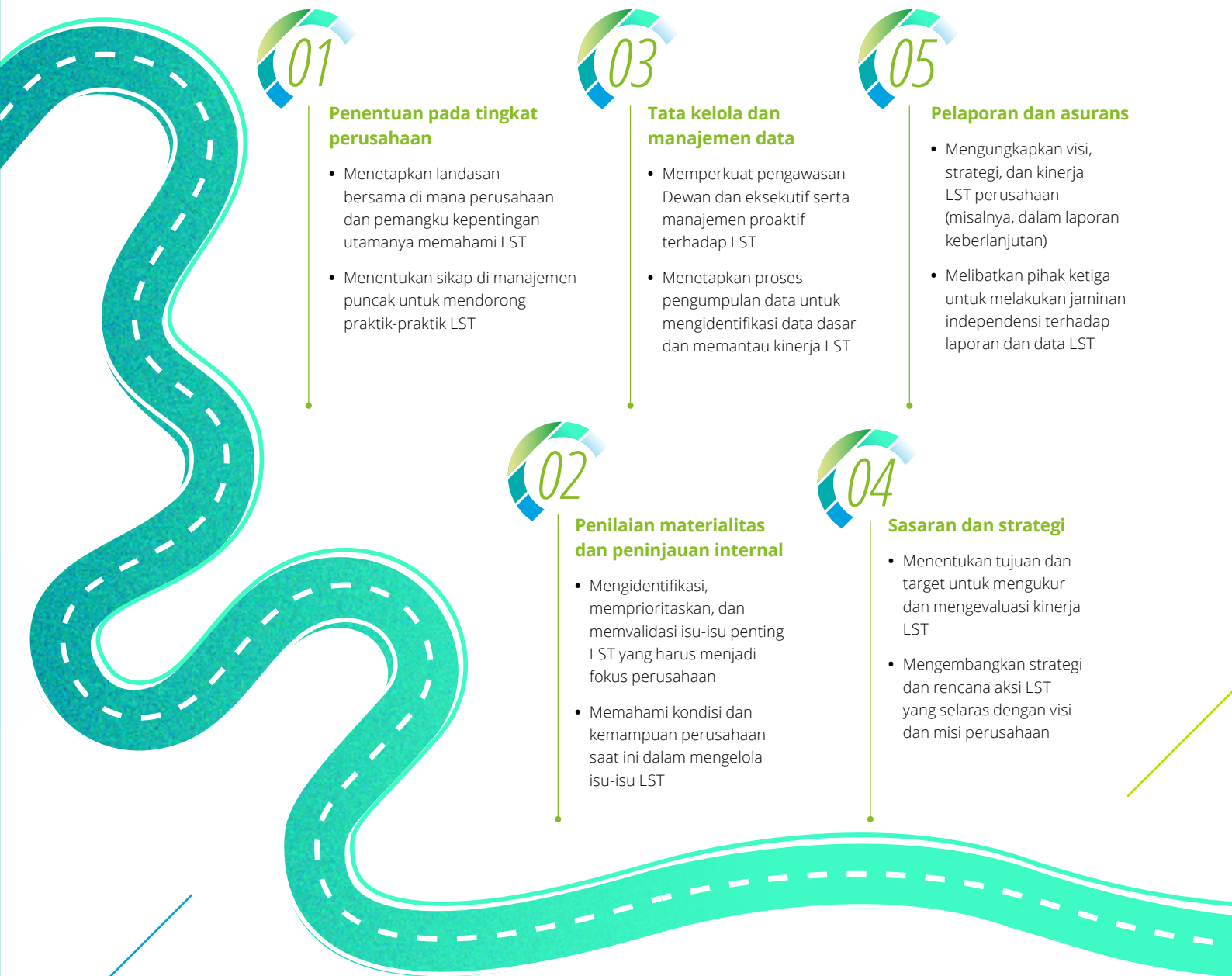
22 “Key takeaways from the United Nations Climate Change Conference (COP28)”. Deloitte Global. 2024.

Perlunya perusahaan bersikap proaktif

Perusahaan semakin diawasi dengan cermat oleh investor dan pemangku kepentingan lainnya, terkait sikap mereka terhadap perubahan iklim, upaya keberlanjutan, dan komitmen untuk menghormati komunitas lokal dan hak asasi manusia. Mengingat tantangan-tantangan LST yang berkembang pesat dan meningkatnya permintaan pemangku kepentingan terhadap bisnis untuk lebih meningkatkan kinerja dan praktik keberlanjutan, para pemimpin bisnis harus mengambil pendekatan proaktif untuk memasukkan praktik-praktik LST secara komprehensif ke dalam bisnis dan operasional mereka.

Berikut ini adalah pendekatan menyeluruh untuk membantu perusahaan mengintegrasikan LST ke dalam bisnis mereka. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk menangkap tren LST dan bersikap menghadapi potensi risikonya baik dalam operasional maupun rantai nilai mereka. Membangun pemahaman mengenai risiko-risiko LST yang material di suatu perusahaan dan signifikansinya bagi organisasi bersama para pemangku kepentingan utama merupakan langkah pertama untuk sepenuhnya mengintegrasikan LST ke dalam bisnis. Pengembangan LST suatu perusahaan dapat didorong melalui landasan bersama ini, yang pada dasarnya terdiri dari banyak komponen.

Gambar 1. Pendekatan menyeluruh untuk mengintegrasikan LST ke dalam suatu bisnis



Sumber: Deloitte Analysis, 2023.

Menentukan sikap pada tingkat perusahaan

Pada tahap awal ini, perusahaan perlu menentukan sikap di antara manajemen puncak untuk mendorong praktik-praktik LST. Proses integrasi LST suatu perusahaan dapat dipercepat dengan menggunakan strategi top-down. Prinsip-prinsip panduan dan komitmen perusahaan ditetapkan dari atas. Untuk melakukan hal ini, dewan direksi dan manajemen senior harus terlebih dahulu memahami prinsip-prinsip LST dan dampaknya terhadap operasi perusahaan. Mengembangkan budaya yang kondusif untuk mendorong agenda LST atau memulai pembicaraan terkait LST di dalam suatu perusahaan memerlukan dukungan dewan direksi dan manajemen senior.

Selain itu, menetapkan landasan bersama juga penting bagi perusahaan dan pemangku kepentingan utama untuk memahami LST. Agar dapat memajukan strategi LST, perusahaan dan pemangku kepentingan utamanya bertindak sebagai pendukung dan penentu perubahan berkelanjutan. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa seluruh pemangku kepentingan utama memahami apa yang dimaksud oleh perusahaan dan bagaimana perusahaan memandang integrasi LST. Mulailah dengan memperluas basis pengetahuan pemangku kepentingan. Dengan meningkatkan kesadaran LST mereka, hal ini akan menciptakan tujuan bagi para pemangku kepentingan yang dapat mendorong mereka untuk mempertimbangkan cara-cara agar perusahaan dapat berjalan lebih efektif, sehingga mendorong inovasi bisnis dan meningkatkan semangat kerja karyawan.

Menilai materialitas

Tahap selanjutnya melibatkan pemahaman perusahaan mengenai kondisi saat ini dan kemampuan perusahaan dalam mengelola isu-isu LST. Subjek besar seperti keberlanjutan mempunyai beberapa dampak LST yang saling berhubungan. Tentukan apa yang sedang dilakukan bisnis Anda saat ini. Kekhawatiran terkait LST merupakan hal yang rumit, oleh karena itu menentukan kondisi Anda saat ini mungkin memerlukan waktu. LST pada dasarnya bersifat lintas fungsi dan memerlukan masukan dari berbagai departemen, termasuk operasional, pengembangan produk, Teknologi Informasi, keuangan, pengadaan, dan penjualan.

Dalam proses ini, mengidentifikasi, memprioritaskan dan memvalidasi topik-topik penting LST adalah hal yang penting. Perusahaan perlu mengidentifikasi dan menilai

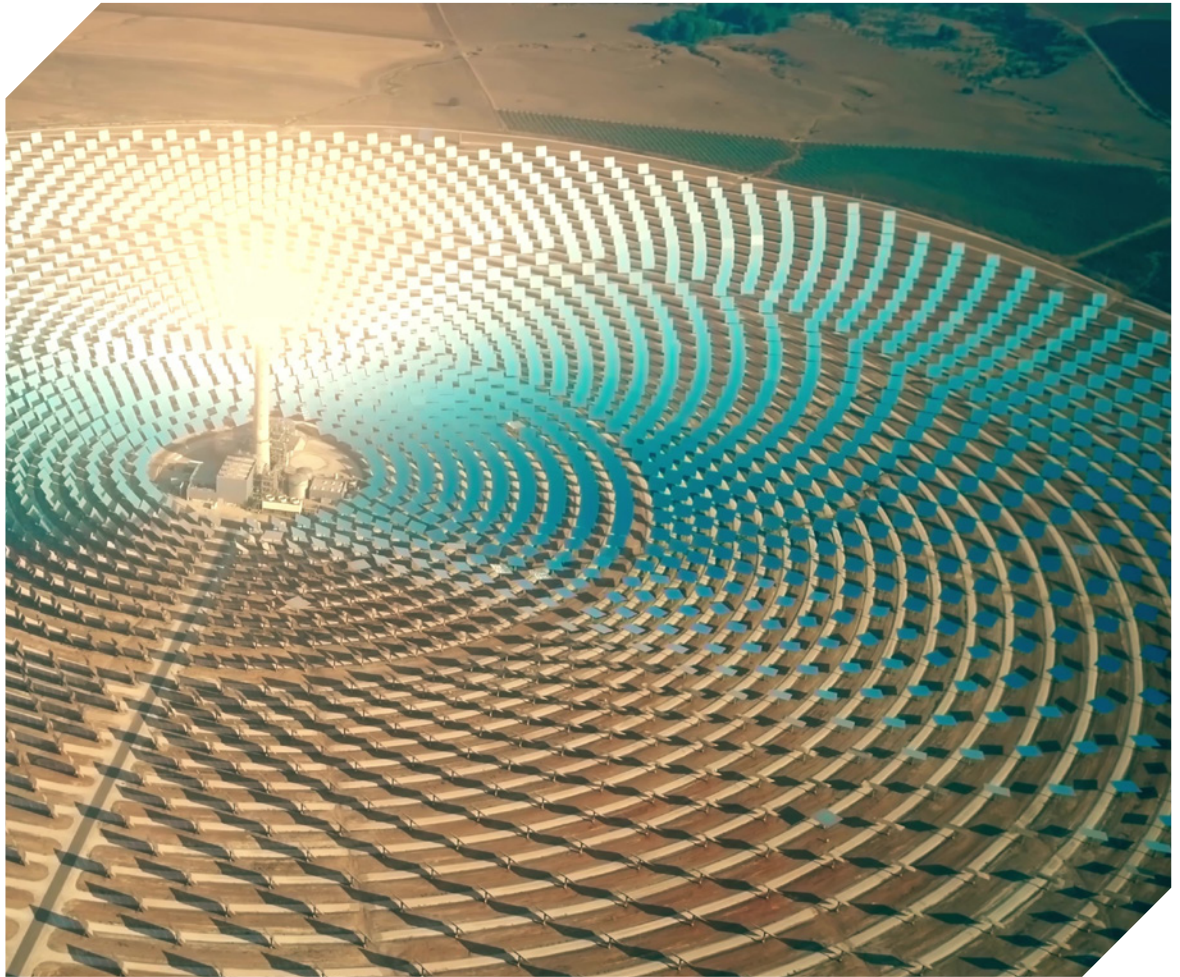
berbagai potensi isu-isu LST yang dapat mempengaruhi bisnis dan pemangku kepentingannya dan memadatkannya ke dalam daftar topik terpilih. Selain itu, penting juga bagi perusahaan untuk mengidentifikasi berbagai pemangku kepentingan saat melakukan penilaian materialitasnya. Perusahaan perlu lebih terlibat dan mencari masukan dan umpan balik dari para pemangku kepentingan untuk mengetahui kekhawatiran dan prioritas masing-masing kelompok pemangku kepentingan terkait topik-topik LST. Setelah melibatkan kelompok pemangku kepentingan yang relevan, perusahaan perlu memasukkan hasil-hasil dan memprioritaskan topik-topik penting berdasarkan kepentingan strategisnya bagi bisnis, kepentingannya bagi para pemangku kepentingan, serta dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan dari setiap topik dalam rantai nilai.

Memperkuat tata kelola dan manajemen data

Perusahaan perlu memperkuat pengawasan Dewan dan manajemen LST yang proaktif. Dewan memainkan peran penting dalam mendorong upaya-upaya LST dan menyebarkan kesadaran akan tujuan perusahaan secara keseluruhan, terutama dalam memasukkan LST ke dalam tugas harian. Perusahaan yang memiliki tata kelola LST yang kuat akan mampu membangun landasan yang kuat dalam mengelola praktik-praktik LST secara efektif. Terdapat beberapa langkah penting yang dapat dipertimbangkan oleh perusahaan ketika meningkatkan tata kelola LST-nya:

- Meningkatkan pemahaman dan kemampuan Dewan mengenai LST, dengan menunjuk anggota Dewan dengan keahlian yang relevan di bidang LST serta memberikan pelatihan dan lokakarya komprehensif mengenai LST;
- Menetapkan struktur tata kelola LST di seluruh perusahaan, misalnya dengan menunjuk komite LST di dalam Dewan, membentuk tim LST yang berdedikasi di tingkat kerja, dan/atau menunjuk *Chief Sustainability Officer (CSO)*;
- Menetapkan peran dan tanggung jawab yang jelas bagi anggota Dewan serta komite-komite terkait dalam mengelola dan memberikan pengawasan atas kinerja dan praktik LST; dan
- Mengembangkan dan menerapkan kebijakan, prosedur, atau pedoman terkait LST yang relevan untuk mendorong penerapan praktik LST yang efektif di seluruh perusahaan.





Pada tahap ini, penetapan proses manajemen data untuk mengidentifikasi data dasar dan memantau kinerja LST juga diperlukan. Memperoleh data yang lengkap, akurat dan tepat waktu sangat penting bagi perusahaan untuk dapat mengukur, memantau, mengevaluasi dan melaporkan kinerja LST-nya, termasuk untuk menetapkan target keberlanjutan yang relevan di masa depan. Namun, mungkin diperlukan waktu untuk mewujudkan proses manajemen data LST yang efisien. Terdapat beberapa langkah penting yang dapat dipertimbangkan perusahaan ketika meningkatkan proses manajemen data LST:

- Mengidentifikasi ruang lingkup data LST yang akan dikelola, termasuk dari mana data tersebut dapat diperoleh dan seberapa sering data tersebut harus dikumpulkan, dilaporkan, dan dilacak;
- Menunjuk pemilik data yang jelas, termasuk peran dan tanggung jawab mereka sepanjang proses pengelolaan data;
- Membangun seperangkat alat pengumpulan data LST serta membangun sistem penyimpanan data; dan
- Memulai sistem pengendalian dan pemantauan internal, termasuk menunjuk siapa yang bertanggung jawab untuk meninjau data, dan seberapa sering data harus ditinjau.

Menentukan target dan strategi

Penting untuk menentukan tujuan dan target guna mengukur dan mengevaluasi kinerja LST dan mengembangkan strategi dan rencana aksi LST yang selaras dengan visi dan misi perusahaan karena keberhasilan LST lebih dari sekedar pola pikir proyek dalam menetapkan, mengevaluasi, dan mencapai tujuan. Berikut adalah beberapa contoh praktik terbaik untuk mengintegrasikan keberlanjutan ke dalam keputusan organisasi:



1. Mengidentifikasi dan memprioritaskan isu-isu LST

Saat menyusun strategi LST, gagasan tentang materialitas juga berlaku sehingga bisnis dapat memfokuskan waktu dan sumber daya mereka pada tujuan-tujuan utama yang dapat memberikan pengaruh jangka panjang. Materialitas dimaksudkan untuk melibatkan para pemangku kepentingan dan membantu mereka memahami permasalahan LST yang harus diprioritaskan. Ini akan memungkinkan perusahaan untuk melaporkan situasinya saat ini dan menjelaskan proyek-proyek masa depan yang akan diprioritaskan dengan lebih sederhana.



2. Menetapkan tujuan strategis

Menetapkan tujuan strategis memungkinkan bisnis membuat rencana yang layak dan berkonsentrasi pada hasil dalam mencapai visinya. Sensitivitas dan kompleksitas politik dimungkinkan dalam situasi strategis. Untuk membedakan bisnis perusahaan dari pesaing, tujuan perusahaan harus ambisius. Namun, jika tidak dapat dipenuhi, pada akhirnya perusahaan akan kehilangan kredibilitas. Perusahaan memperoleh kepercayaan dengan melakukan proses ini terlebih dahulu, baik secara internal maupun eksternal.



3. Menetapkan target

Setiap fungsi harus memiliki peran tertentu, dan KPI serta penetapan target harus mencerminkan hal ini. Pastikan bahwa tindakan yang dipilih perusahaan dapat diterima dan bermakna. Selain itu, langkah-langkah LST harus dimasukkan ke dalam praktik kerja rutin perusahaan. Dengan kata lain, agar prioritas LST mempunyai dampak yang nyata, hal tersebut harus tercermin dalam laporan keuangan perusahaan, permintaan alokasi, permintaan proposal dan penawaran harga, peraturan SDM, evaluasi bisnis bulanan, dan hasil kerja lainnya. Manajemen perusahaan dapat membuat strategi dan peta jalan implementasi yang menyeluruh, termasuk komunikasi internal dan eksternal, setelah perusahaan memiliki target, KPI, dan indikator lainnya.



4. Tinjauan dan umpan balik

Ketika nilai berubah, rasa memiliki dan komitmen para pemangku kepentingan terhadap tujuan-tujuan LST dapat menurun, yang tentunya akan memperlambat kemajuan tujuan-tujuan perusahaan. Bisnis dapat mengadopsi kebijakan dan program yang secara agresif mendorong masukan dari pemangku kepentingan untuk mendapatkan kembali rasa kepemilikan dan komitmen. Umpan balik ini berguna untuk melacak perkembangan tujuan LST dan menilai kesinambungan pencapaian, kesulitan, dan signifikansi dari tujuan-tujuan tersebut.



Memberikan laporan dan asurans yang komprehensif

Perusahaan perlu mengungkapkan visi, strategi, dan kinerja LST mereka (misalnya, dalam Laporan Keberlanjutan). Bagi perusahaan dengan segala ukuran, pelaporan dapat memberikan wawasan yang berguna. Namun, penting untuk memastikan bahwa bisnis siap melakukan penelitian yang efisien mengenai bagaimana strategi LST mempengaruhi kesuksesan finansial. Tujuan utama pelaporan adalah untuk menawarkan kepada pengguna pemahaman yang lebih menyeluruh tentang bagaimana keberhasilan suatu perusahaan dipengaruhi oleh hubungannya dengan elemen keuangan dan non-keuangan. Dengan memperhatikan indikator kinerja bisnis dan faktor-faktor LST, pelaporan terpadu membantu perusahaan menyampaikan cerita lengkap tentang apa yang memotivasi kesuksesan mereka. Hal ini memberikan investor pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana target-target LST berkontribusi dari waktu

ke waktu terhadap penciptaan nilai perusahaan. Yang paling penting, pelaporan LST dapat membantu bisnis dalam mengambil keputusan yang lebih baik dengan mengidentifikasi inisiatif berbasis LST yang paling sesuai bagi mereka.²³

Pada tahap selanjutnya, keterlibatan dengan pihak ketiga akan bermanfaat untuk melakukan jaminan independensi atas pelaporan dan data LST. Tujuan jaminan keberlanjutan dapat dicapai dengan berbagai cara. Sebuah perusahaan dapat memutuskan untuk mengungkapkan statistik keberlanjutannya secara independen, dengan bantuan penyedia jasa pihak ketiga, atau di bawah pengawasan asosiasi perdagangan atau upaya multi-pemangku kepentingan.²⁴ Berikut ini adalah beberapa contoh bagaimana perusahaan mencapai jaminan LST mereka:

- Perusahaan dapat mempublikasikan laporannya secara independen menggunakan penelitian dan analisisnya sendiri. Biaya pengelolaan pelaporan praktik terbaik di seluruh area perusahaan dan menghasilkan laporan yang meyakinkan menjadikan opsi ini paling mahal. Namun, opsi ini memberikan kemampuan bagi bisnis untuk memutuskan rincian apa saja yang disertakan dalam laporan mereka, bagaimana laporan tersebut disajikan, dan apa kesimpulannya;
- Perusahaan dapat melakukan alih daya (*outsourcing*) pengembangan atau pengelolaan laporannya kepada penyedia jasa luar. Pendekatan ini membutuhkan lebih sedikit tenaga kerja, namun data yang digunakan harus dapat diakses oleh publik. Tergantung pada bagaimana jasa disediakan oleh penyedia, mungkin terdapat pembatasan mengenai informasi apa yang dapat dimasukkan; dan
- Bisnis mempunyai opsi untuk menyerahkan laporannya ke organisasi pihak ketiga. Jasa asurans akan menyatakan bahwa perusahaan melaporkan sesuai dengan standar internasional, yang mungkin diwajibkan oleh hukum atau kebijakan internal; hal ini memungkinkan bisnis menghindari pengeluaran uang untuk mengembangkan standar pelaporannya sendiri. Dengan membantu pengembangan kredibilitas laporan keberlanjutan dan meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan terhadap laporan tersebut, penggunaan jasa asurans akan memberikan manfaat bagi bisnis dan pemangku kepentingan mereka dalam berbagai cara. Pemangku kepentingan dapat lebih mudah memperoleh laporan dan mengandalkan informasi yang ada di dalamnya. Ini bisa menjadi opsi dengan harga paling murah dibandingkan opsi lainnya.

23 Silanes et al. "ESG Performance and Disclosure: A Cross-Country Analysis". 28 Januari 2020.

24 Dean Emerick. "What is Sustainability Report Assurance?". 2022.

Menjembatani kesenjangan pendanaan iklim di Indonesia dengan obligasi hijau

Menyadari betapa pentingnya krisis iklim, Indonesia telah berkomitmen untuk mencapai beberapa target ambisius, termasuk namun tidak terbatas pada pengurangan emisi sebesar 32% pada 2030 dan pencapaian emisi *net-zero* pada 2060 atau lebih awal.²⁵ Meskipun hal ini tidak diragukan lagi merupakan langkah yang tepat, mewujudkan target-target ini memerlukan komitmen finansial yang besar baik dari sektor swasta maupun publik: ini diperkirakan mencapai 150-200 miliar Dolar AS per tahun antara 2021 dan 2030, angka yang mewakili antara 3,4% dan 4,5% dari produk domestik bruto (PDB) pada periode tersebut.

Tuntutan finansial ini diperkirakan akan meningkat pada dekade-dekade mendatang. Kebutuhan investasi tahunan Indonesia diperkirakan akan melonjak hingga 700 miliar-

triliun Dolar AS antara 2031 dan 2040, terus meningkat menjadi 1,3-1,6 triliun Dolar AS antara 2041 dan 2050, dan kembali mencapai puncaknya pada 2,1-2,2 triliun Dolar AS antara 2051 dan 2070.²⁶ Oleh karena itu, komitmen keuangan yang besar dan terus meningkat ini menggarisbawahi kebutuhan mendesak untuk mengembangkan strategi pembiayaan berkelanjutan yang kuat – yang akan memperkuat aliran masuk keuangan dari sektor publik, swasta, dan nirlaba menuju prioritas pembangunan berkelanjutan.

25 "Indonesia - UNDP Climate Promise". United Nations Development Programme. Diakses 17 November 2023.

"Indonesia aims to hit net zero ahead of 2060 goal, minister says". Bloomberg. 6 Juni 2023.

26 "A green economy for a net-zero future: How Indonesia can build back better after Covid-19 with the Low Carbon Development Initiative (LCDI)". Ministry of National Development Planning/BAPPENAS. 2021.

Untuk mencapai tujuan tersebut, pada awal 2017 Indonesia telah memulai perjalanan pembiayaan berkelanjutan nasional dengan penerapan *Sustainable Finance Roadmap in Indonesia, 2015-2019* (Tahap I), yang kemudian diikuti dengan *Sustainable Finance Roadmap in Indonesia, 2021-2025* (Tahap II) pada awal 2021. Namun yang lebih penting lagi, pada 2017 OJK juga telah mengeluarkan peraturan tentang penerapan keuangan berkelanjutan melalui POJK No. 51/POJK.03/2017 dan peraturan lain yang memberikan panduan mengenai proses penerbitan dan ketentuan obligasi hijau pada POJK No. 60/POJK.04/2017 – tidak hanya menjadikan Indonesia salah satu negara pertama di Asia Tenggara yang menerbitkan peraturan obligasi hijau, namun juga membuka peluang bagi pengembangan pasar obligasi hijau di Indonesia yang menjanjikan.²⁷ Pada tahun lalu, peraturan tersebut telah dicabut melalui POJK No. 18/2023, yang mana telah mendefinisikan /EBUS Lingkungan Hidup/Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan (Pasal 1 angka 3 POJK No. 18/2023) sebagai efek bersifat utang yang hasilnya digunakan untuk membiayai atau mendanai kembali (*refinancing*) kegiatan usaha yang berwawasan lingkungan hidup. Selain itu, POJK No. 18/2023 juga memberikan definisi yang terpisah untuk "sukuk hijau", "obligasi sosial", "sukuk sosial", "obligasi berkelanjutan" "sukuk berkelanjutan", "obligasi terkait keberlanjutan", "sukuk terkait keberlanjutan", dan lain-lain.



Jenis-jenis instrumen keuangan yang umum dalam keuangan berkelanjutan

- **Obligasi hijau** adalah instrumen pendapatan tetap dimana penerbitnya, mulai dari korporasi hingga pemerintah dan lembaga keuangan, mengumpulkan modal yang secara khusus ditujukan untuk proyek-proyek yang memberikan manfaat bagi lingkungan. Kerangka kerja ini, yang seringkali disertifikasi oleh pihak ketiga, menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam alokasi dananya.
- **Pinjaman hijau** dirancang untuk inisiatif pembiayaan (*financing*) atau pembiayaan kembali (*refinancing*) yang memberikan dampak positif terhadap lingkungan, melayani beragam proyek termasuk pengembangan bangunan ramah lingkungan dan inisiatif pengurangan polusi.
- **Pembiayaan transisi** mendukung transisi entitas dari operasi tinggi karbon ke operasi rendah karbon. Ini sangat penting bagi sektor-sektor seperti energi dan manufaktur dalam memfasilitasi peralihan menuju praktik yang lebih berkelanjutan.
- **Pinjaman terkait keberlanjutan** menghubungkan persyaratan pinjaman dengan pencapaian target kinerja keberlanjutan yang telah ditentukan sebelumnya. Target-target ini mungkin mencakup metrik lingkungan yang dapat diukur, seperti pengurangan emisi, atau tujuan kesejahteraan sosial yang lebih luas.
- **Obligasi terkait keberlanjutan.** Mengacu pada dana yang diterima dari pemberi pinjaman melalui bank atau lembaga keuangan lainnya kepada pemilik proyek.

Panduan tentang pasar obligasi hijau di Indonesia

Secara singkat, obligasi hijau mengacu pada instrumen keuangan pendapatan tetap yang digunakan untuk meningkatkan modal guna mendanai proyek-proyek yang bermanfaat bagi lingkungan, seperti proyek yang berkaitan dengan energi terbarukan, efisiensi energi, transportasi ramah lingkungan, dan bangunan ramah lingkungan. Berbeda dengan obligasi konvensional, utang yang diperoleh dari penawaran obligasi hijau diperuntukkan untuk pembiayaan (*financing*) atau pembiayaan kembali (*refinancing*) tujuan dan kegiatan tertentu yang, secara langsung atau tidak langsung, membantu mendukung transisi sektor energi dari sumber energi berbasis fosil ke sumber energi terbarukan.

Meskipun obligasi hijau bukanlah satu-satunya sumber pembiayaan berkelanjutan (lihat boks untuk "Jenis-jenis instrumen keuangan yang umum dalam keuangan berkelanjutan"), obligasi ini tidak diragukan lagi merupakan salah satu instrumen pembiayaan berkelanjutan yang tumbuh paling cepat dan relatif lebih matang. Dalam konteks Indonesia, potensi yang menjanjikan ini terlihat jelas dalam rekam jejak dan kinerja terkini: delapan *sovereign green sukuk* atau obligasi Sharia perintis telah diterbitkan baik di pasar dalam negeri maupun luar negeri sejak 2018, dan respons investor terhadap penerbitan ini melebihi permintaan biasa terhadap surat berharga pemerintah Indonesia.²⁸

Perlu juga diperhatikan bahwa pada 2022, Indonesia, dengan penerbitan kumulatif sukuk hijau sebesar 6,9 miliar Dolar AS, merupakan penerbit sukuk hijau terbesar di dunia dan pemimpin pasar *sovereign green sukuk*.²⁹ Sukuk ini telah mendapatkan banyak pengakuan global atas kontribusinya terhadap mitigasi perubahan iklim, adaptasi, dan pelestarian keanekaragaman hayati, dan dana yang terkumpul disalurkan ke berbagai inisiatif ramah iklim, seperti energi terbarukan dan transportasi berkelanjutan.

27 "Green bond market survey for Indonesia insights on the perspectives of institutional investors and underwriters". Asian Development Bank. November 2022.

28 "Green bond market survey for Indonesia insights on the perspectives of institutional investors and underwriters". Asian Development Bank. November 2022.

29 "Green sukuk: Allocation and impact report 2023". Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2023.

Penerbitan obligasi sektor publik terus memimpin pasar obligasi berkelanjutan yang ramah lingkungan dan lebih luas di Indonesia – secara kolektif bernilai sekitar 7 miliar Dolar AS pada Maret 2022.³⁰ Namun demikian, momentum di sektor swasta juga mulai meningkat (lihat “Tonggak penting dalam pengembangan pasar obligasi hijau dan berkelanjutan di Indonesia”) berkat upaya signifikan untuk mendorong sektor swasta agar memprioritaskan investasi hijau, seperti diterbitkannya Taksonomi Hijau Indonesia oleh OJK pada Januari 2022 dan diikuti oleh penerbitan Taksonomi Indonesia untuk Pembiayaan Berkelanjutan pada Februari 2024, yang menetapkan kategori-kategori yang memenuhi syarat untuk mendapatkan pembiayaan berkelanjutan bagi para pemangku kepentingan yang terlibat dalam kegiatan ekonomi berkelanjutan.³¹

Secara keseluruhan, kami telah mengidentifikasi empat tren utama berdasarkan pengamatan kami terhadap perkembangan terkini pasar obligasi hijau di Indonesia:



Meningkatnya minat internasional:

Pasar obligasi hijau di Indonesia saat ini mengalami lonjakan investasi internasional, didorong oleh potensi imbal hasil yang stabil dan pendekatan progresif terhadap pengelolaan lingkungan hidup. Beberapa bukti dari meningkatnya minat dunia internasional adalah pada tahun 2018 IFC (International Finance Corporation) telah menerbitkan obligasi hijau dalam mata uang Rupiah dengan nama Komodo Bond dan berhasil memperoleh dana investor sebesar 134 juta Dolar AS.³⁴ Pada tahun 2023 PT. PGEO (PT Pertamina Geothermal Energy) telah menerbitkan obligasi hijau sebesar 400 juta Dolar AS, dan mengalami kelebihan permintaan sebanyak 8.025 kali. Hal ini menunjukkan ekspektasi yang tinggi dari investor internasional terhadap perusahaan energi utama Indonesia yang menghasilkan energi hijau.³⁵



Diversifikasi emiten:

Awalnya didorong oleh penerbitan obligasi pemerintah, pasar obligasi hijau di Indonesia kini telah berkembang hingga mencakup lebih banyak emiten, mulai dari korporasi hingga entitas kota, sehingga tercipta pasar yang lebih inklusif dan beragam yang melayani lebih banyak proyek keberlanjutan. Saat ini, penerbitan obligasi hijau didominasi oleh pemerintah sekitar 70 persen, dan sisanya oleh korporasi termasuk bank.³² Pada tahun 2023, beberapa bank telah menerbitkan obligasi hijau, seperti PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI) yang menerbitkan obligasi hijau senilai Rp5 triliun di bulan Juni, dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) yang menerbitkan obligasi hijau senilai Rp6 triliun di bulan Oktober 2023. Di antara emiten korporasi, PT Arkora Hydro Tbk (ARKO) menerbitkan obligasi hijau senilai Rp339,89 miliar di bulan Agustus, dan PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGEO) menerbitkan obligasi hijau senilai Rp5,86 triliun pada April 2023.³³



30 “Green bond market survey for Indonesia insights on the perspectives of institutional investors and underwriters”. Asian Development Bank. November 2022.

31 Ibid.

32 “Peningkatan Pembiayaan Hijau Dirangsang “Gempuran” Kebijakan”. Kompas.com. 27 Mei 2023.

33 “Penerbitan Green Bond di Indonesia Diprediksi Semakin Semarak”. 18 Oktober 2023; “Obligasi Hijau Membludak 8,25 Kali, Neraca PGEO Makin Sehat”. CNBC Indonesia. 16 Agustus 2023.

34 “Terbitkan Green Bond, IFR Raup Dana 2 Milyar”. Infobanknews.com. 8 Oktober 2018.

35 “Green Bond PGEO Laris Diserbu Investor Asing. Ini Alasannya”. CNBC Indonesia. 8 Mei 2023



Dasar dan kepastian hukum:

Peraturan OJK Nomor 18 Tahun 2023 (POJK No. 18/2023) tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Bersifat Utang dan Sukuk

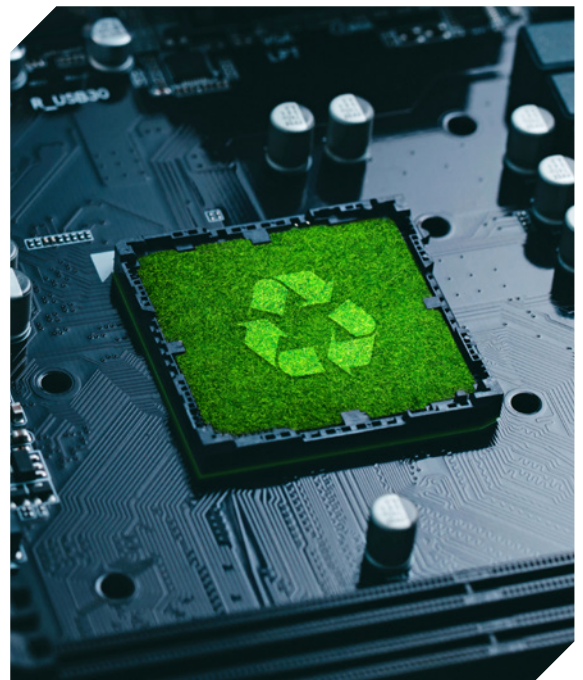
Berbasis Efek Beragun Aset memberikan dasar hukum dan kepastian bagi emiten yang ingin menawarkan efek bersifat utang untuk mendanai atau mendanai kembali (*refinancing*) sebagian atau seluruh kegiatan usahanya yang bersifat berkelanjutan. Peraturan ini mencabut POJK No. 60/POJK.04/2017 sejak 10 Oktober 2023. Dibandingkan dengan rezim peraturan tahun 2017, POJK No. 18/2023 memperluas sifat instrumen surat utang dengan memasukkan instrumen berbasis syariah dan menjadi dasar peraturan untuk "obligasi/sukuk hijau", "obligasi/sukuk sosial", "obligasi/sukuk berkelanjutan", "obligasi/sukuk terkait keberlanjutan", dan instrumen surat utang berkelanjutan lainnya yang diputuskan oleh OJK. Peraturan ini menjadi dasar untuk penawaran umum atau penawaran swasta di sektor surat utang dan juga mendefinisikan kriteria, persyaratan, prosedur, dan kewajiban pelaporan untuk emiten dan ahli lingkungan hidup yang menilai, memverifikasi, atau menguji dampak keberlanjutan dari proyek-proyek yang didanai.



Instrumen inovatif:

Pengenalan instrumen keuangan inovatif Indonesia, terutama sukuk hijau, meningkatkan daya tarik pasar dengan mengintegrasikan

prinsip-prinsip investasi tradisional dengan tujuan keberlanjutan, sehingga memperluas basis investor dan memperdalam dampak pasar. Untuk mendukung inisiatif keuangan ini, serangkaian program kampanye dan advokasi baik di forum nasional maupun internasional dilakukan untuk meningkatkan eksposur inisiatif sukuk hijau.³⁶



36 "Green Bonds Market Survey in Indonesia". Asian Development Bank. November 2022.

POJK No. 18/2023: Menjembatani Kesenjangan Pendanaan Iklim Melalui Obligasi Hijau dan Instrumen Berkelanjutan dengan Aspek yang Lebih Luas

Pada bulan Oktober 2023, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperkenalkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 18 Tahun 2023 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Bersifat Utang dan Sukuk Berlandaskan Keberlanjutan (POJK No. 18/2023). Peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan keterlibatan lembaga keuangan dalam mitigasi dampak perubahan iklim, sejalan dengan komitmen Indonesia di bawah Perjanjian Paris, yang merupakan prioritas di tingkat nasional, regional ASEAN, dan global. Peraturan ini merupakan bagian dari *roadmap* keuangan berkelanjutan yang lebih luas yang bertujuan untuk mengembangkan industri pasar modal.

POJK 18/2023 menggantikan POJK No. 60/POJK.04/2017, yang awalnya berpusat pada Obligasi Hijau, dengan memperluas cakupannya untuk mencakup lebih banyak sekuritas, tema-tema keberlanjutan, dan prosedur penerbitan. POJK No. 18/2023 dapat menjadi pendekatan strategis untuk menjembatani kesenjangan pendanaan iklim di Indonesia, dengan memperkenalkan instrumen keuangan berkelanjutan yang lebih beragam dan luas.³⁷

Dalam peraturan tersebut, POJK No. 18/2023 tidak hanya mencakup surat utang yang berorientasi pada lingkungan hidup tetapi juga memperkenalkan:³⁸

01. Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan (*green bonds*) dan/atau Sukuk Berwawasan Lingkungan (*green sukuk*) yang selanjutnya disebut EBUS Berwawasan Lingkungan adalah Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk yang dana hasil penerbitannya digunakan untuk membiayai atau mendanai kembali (*refinancing*) kegiatan usaha yang berwawasan lingkungan.
02. Efek Bersifat Utang Sosial (*social bond*) dan/atau Sukuk Sosial (*social sukuk*) yang selanjutnya disebut EBUS Sosial adalah Efek bersifat utang dan/atau Sukuk yang dana hasil penerbitannya digunakan untuk membiayai (*financing*) atau mendanai kembali (*refinancing*) kegiatan usaha yang berfokus pada kegiatan sosial.

03. Efek Bersifat Utang Berkelanjutan (*sustainability bond*) dan/atau Sukuk Berkelanjutan (*sustainability sukuk*), yang selanjutnya disebut EBUS Berkelanjutan, adalah Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk yang dana hasil penerbitannya digunakan untuk membiayai (*financing*) atau membiayai kembali (*refinancing*) kegiatan usaha yang berwawasan lingkungan dan sosial.

04. Sukuk Wakaf adalah Sukuk yang hasil penerbitannya digunakan untuk membiayai (*financing*) atau membiayai kembali (*refinancing*) kegiatan/proyek dalam rangka mengoptimalkan manfaat aset wakaf.

05. Efek Bersifat Utang Berkelanjutan (*sustainability-linked bond*) dan/atau Sukuk Bersifat Utang Berkelanjutan (*sustainability-linked sukuk*) yang selanjutnya disebut EBUS Berkelanjutan adalah efek bersifat utang dan/atau sukuk yang penerbitannya dikaitkan dengan pencapaian indikator kinerja utama keberlanjutan tertentu.

Peraturan ini juga mendorong pendanaan untuk proyek-proyek dengan spektrum yang lebih luas, mulai dari inisiatif lingkungan hingga sosial. Sebelumnya, di bawah POJK No. 60/POJK.04/2017, fokus utamanya adalah pada inisiatif lingkungan, termasuk:

- A. Energi terbarukan;
- B. Efisiensi energi;
- C. Pencegahan dan pengendalian polusi;
- D. Pengelolaan sumber daya alam hayati dan penggunaan lahan yang berkelanjutan;
- E. Konservasi keanekaragaman hayati darat dan air;
- F. Transportasi yang ramah lingkungan;
- G. Pengelolaan air dan air limbah yang berkelanjutan;
- H. Adaptasi perubahan iklim;
- I. Produk yang mengurangi penggunaan sumber daya dan menghasilkan lebih sedikit polusi;
- J. Bangunan ramah lingkungan yang memenuhi standar atau sertifikasi yang diakui secara nasional, regional, atau internasional; dan/atau
- K. Kegiatan atau proyek bisnis lain yang berorientasi pada lingkungan.

Pengenalan peraturan POJK No. 18/2023 secara signifikan memperluas fokus ini dengan memasukkan pembiayaan inisiatif sosial, sehingga memperluas potensi dampak investasi seperti:

³⁷ "Salinan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2023". Otoritas Jasa Keuangan Indonesia. 2023.

³⁸ Ibid.

- L. Layanan infrastruktur dasar yang terjangkau dalam hal akses dan harga;
- M. Akses ke layanan-layanan penting;
- N. Perumahan yang terjangkau;
- O. Penciptaan lapangan kerja, dan program-program yang dirancang untuk mencegah dan/atau mengurangi pengangguran, termasuk pembiayaan untuk usaha kecil dan menengah (UKM) dan pembiayaan mikro;
- P. Ketahanan pangan dan sistem pangan berkelanjutan;
- Q. Peningkatan dan pemberdayaan sosial-ekonomi; dan/atau
- R. Kegiatan atau proyek bisnis lain yang berorientasi sosial.

Dengan menggabungkan berbagai instrumen dan dimensi keuangan, peraturan ini menarik bagi basis investor yang beragam dengan minat dan nilai yang berbeda-beda, termasuk mereka yang menganut prinsip-prinsip keuangan Islam.

Selain itu, peraturan ini juga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. POJK 18/2023 mengamankan emiten untuk mengikuti pedoman khusus terkait penggunaan dana, pelaporan, dan tinjauan eksternal. Persyaratan transparansi dan akuntabilitas ini tidak hanya membangun kepercayaan investor, tetapi juga memastikan bahwa dana yang terkumpul digunakan secara efektif untuk tujuan berkelanjutan yang telah ditetapkan, sehingga memaksimalkan dampaknya terhadap upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

Menjembatani kesenjangan pendanaan iklim di Indonesia dengan obligasi hijau

Selama lima tahun terakhir, kami telah mencatat sejumlah penerbitan obligasi utama yang berperan penting dalam membentuk lanskap obligasi hijau di Indonesia. Daftar pencapaian (*non-exhaustive list of milestones*) tersebut mencakup:

- **Februari 2019:** Pemerintah menerbitkan sukuk hijau global kedua senilai 750 juta Dolar AS.³⁹
- **November 2019:** Indonesia menerbitkan *sovereign retail green sukuk* pertama di dunia yang menghasilkan total dana sebesar Rp1,46 triliun.⁴⁰
- **Juni 2020:** Pemerintah menerbitkan sukuk hijau global ketiga yang mengumpulkan dana sebesar 750 juta Dolar AS. Meskipun pandemi global masih berlangsung, penerbitan ini mengalami kelebihan permintaan sebesar 7,37 kali.⁴¹

- **November 2020:** Indonesia menerbitkan sukuk hijau ritel kedua yang mengumpulkan dana sebesar Rp5,4 triliun.⁴²
- **Juni 2021:** Indonesia menerbitkan sukuk hijau global keempat senilai 750 juta Dolar AS dengan tenor 30 tahun – tenor terpanjang yang pernah diperoleh sukuk hijau di pasar global.⁴³
- **November 2021:** Indonesia menerbitkan sukuk hijau ritel ketiga yang mengumpulkan dana sebesar Rp5 triliun.⁴⁴
- **September 2022:** Indonesia menerbitkan sukuk hijau grosir pertama melalui lelang. Dana sebesar Rp5,66 triliun digunakan untuk mendukung Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah.⁴⁵
- **Juni 2023:** Bank Mandiri menerbitkan obligasi hijau senilai Rp5 triliun.⁴⁶
- **Oktober 2023:** Bank BRI menerbitkan obligasi hijau senilai Rp6 triliun.⁴⁷
- **Maret 2024:** Bank BRI menerbitkan obligasi hijau senilai Rp2,5 triliun.⁴⁸

Peraturan OJK yang baru (POJK No. 18/2023) semakin memperjelas bagi para pemodal swasta untuk memasukkan faktor sosial dan lingkungan serta keberlanjutan dalam cakupan investasi mereka. Dengan diluncurkannya peraturan tersebut pada 19 Oktober 2023, pemerintah Indonesia ingin membangun jembatan untuk menyelesaikan masalah kesenjangan pendanaan iklim dengan mendukung pengembangan obligasi hijau di Indonesia. Peraturan ini merupakan tindak lanjut dari peta jalan keuangan berkelanjutan untuk mengembangkan industri pasar modal.⁴⁹ Bertujuan untuk mendorong pengembangan efek bersifat utang yang berbasis keberlanjutan, peraturan ini mengatur bahwa efek bersifat utang, atau sukuk (EBUS), harus berbasis keberlanjutan dalam bentuk EBUS berwawasan lingkungan, EBUS berwawasan sosial, EBUS berwawasan keberlanjutan, sukuk wakaf, atau EBUS berwawasan keberlanjutan lainnya yang ditetapkan oleh OJK.

Mengenai penggunaan dana dari penerbitan EBUS, hal ini tergantung dari jenis EBUS yang diterbitkan. Sebagai contoh, jika dana tersebut berasal dari penerbitan EBUS berwawasan lingkungan, maka dana tersebut hanya dapat digunakan untuk kegiatan usaha berwawasan lingkungan (KUBL).

39 Marchio Irfan Gorbiano. "Indonesia issues US\$ 2b global green, regular sukuk." The Jakarta Post. 18 Februari 2019.

40 Nessreen Tamano. "Indonesia's green retail sukuk: First of its kind". Islamic Sustainable Finance & Investment. 17 Desember 2019.

41 "Scaling up green, social, sustainability and sustainability-linked bond issuances in developing countries". OECD. 2021.

42 "How ESG factors are impacting retail debt programs: Indonesia experience on issuing retail green sukuk". Simposium Manajemen Utang Ritel Internasional 2022. Departemen Keuangan Amerika Serikat dan Bank Dunia. 19 Oktober 2022.

43 "Scaling up green, social, sustainability and sustainability-linked bond issuances in developing countries". OECD. 2021.

44 "How ESG factors are impacting retail debt programs: Indonesia experience on issuing retail green sukuk". Simposium Manajemen Utang Ritel Internasional 2022. Departemen Keuangan Amerika Serikat dan Bank Dunia. 19 Oktober 2022.

Jika EBUS berwawasan sosial, maka dana tersebut hanya boleh digunakan untuk KUBL dan kegiatan usaha berwawasan sosial (KUBS). Dan untuk sukuk wakaf, dana hanya dapat digunakan untuk kegiatan yang digunakan untuk mengoptimalkan manfaat harta benda wakaf. Dengan adanya perbedaan tersebut, maka dana dari EBUS berwawasan keberlanjutan hanya dapat digunakan untuk tujuan umum perusahaan, yang meliputi peningkatan modal kerja dan ekspansi usaha, selama EBUS berwawasan keberlanjutan tersebut terkait dengan indikator utama yang digunakan untuk mengukur kinerja atas aktivitas berbasis keberlanjutan yang telah ditetapkan (*Sustainability based IKU*).

Untuk penawaran umum berkelanjutan berbasis EBUS, emiten dapat melakukan *shelf registration* secara bertahap, dengan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Mereka harus memenuhi semua kewajiban sebagaimana ditentukan dalam peraturan mengenai penawaran umum berkelanjutan efek bersifat utang dan/atau sukuk, kecuali yang secara khusus diatur dalam peraturan OJK terbaru ini.

Berdasarkan estimasi ADB, kebutuhan tahunan Indonesia untuk mendukung infrastruktur yang tahan terhadap perubahan iklim adalah sekitar 74 miliar Dolar AS. Dengan kesenjangan pendanaan tahunan lebih dari 51 miliar Dolar AS pada tahun 2021, investasi swasta diharapkan dapat ditingkatkan untuk menjembatani kesenjangan pendanaan infrastruktur ini.⁵⁰

Dengan meningkatnya pertumbuhan modal swasta sebesar 600 miliar Dolar AS pada akhir tahun 2022 di pasar saham atau 15,1%, serta meningkatnya pinjaman bank sebesar 385 miliar Dolar AS atau 11,2% dari tahun ke tahun, hal ini menunjukkan potensi kontribusi pendanaan swasta untuk memenuhi kesenjangan pendanaan iklim sebesar 145 miliar Dolar AS. Rata-rata 3,4 miliar Dolar AS per tahun untuk investasi yang selaras dengan iklim disediakan oleh pelaku keuangan swasta, yang menunjukkan sekitar 3% dari seluruh investasi pelaku swasta. Sebagian besar berasal dari lembaga keuangan komersial (FI) yang diamanatkan oleh peraturan untuk mendanai UMKM dan proyek-proyek yang selaras dengan iklim.⁵¹

Peran bank di pasar obligasi hijau

Meskipun pemerintah, lembaga pemerintah, dan industri penghasil karbon perlu mendorong solusi efektif terhadap perubahan iklim, bank – sebagai

perantara keuangan dan pemain sentral dalam perekonomian – memainkan peran penting dalam mendukung transisi klien mereka di berbagai sektor ekonomi riil. Sadar akan kebutuhan untuk memenuhi peran ini, bank-bank di Indonesia semakin mengevaluasi peluang bisnis, risiko, dan cara memanfaatkan obligasi hijau untuk mendukung dan mendampingi nasabah mereka dalam perjalanan menuju netralitas iklim.

Namun, kekhawatiran utama bagi banyak pelaku perbankan mencakup kebutuhan untuk memberikan perhatian yang cermat terhadap bagaimana modal dialihkan dan risiko yang ditimbulkan oleh aset-aset yang berpotensi terbengkalai yang telah atau akan mengalami penurunan nilai yang tidak terduga atau prematur, devaluasi, atau konversi menjadi kewajiban. Selain itu, meskipun terdapat inisiatif untuk menyelaraskan metodologi pelaporan, bank dan nasabah korporat masih menghadapi keterbatasan data yang signifikan, khususnya dalam pengukuran emisi cakupan 3 – yang merupakan prasyarat penting untuk menetapkan target dan menyelaraskan netralitas iklim.

Ke depannya, kami berharap pertimbangan-pertimbangan ini akan memainkan peran penting dalam setiap langkah proses penerbitan obligasi hijau (lihat “Ikhtisar proses penerbitan obligasi hijau”). Pertanyaan lain yang belum terselesaikan juga mencakup peran spesifik bank dalam mencapai netralitas iklim – misalnya, apakah bank harus mengambil peran sebagai pendorong atau fasilitator dalam transisi – dan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini pada akhirnya bergantung pada sifat aktivitas bank, lokasi bank beroperasi, siapa nasabahnya, dan kematangan sektor ekonomi riil yang aktif dalam portofolionya.

Ikhtisar proses penerbitan obligasi hijau

Secara umum, bank melakukan serangkaian lima langkah besar dalam penerbitan obligasi hijau:

01. Melakukan analisis pasar: Untuk menilai kelayakan dan keberlanjutan penerbitan obligasi hijau, analisis komprehensif dilakukan untuk menilai potensi pasar, mengevaluasi permintaan instrumen keuangan di antara berbagai kelompok investor, dan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan investasi mereka.

45 Ibid.

46 “Building a better future: IFC Annual Report 2023”. IFC. 2023.

47 “Bank Rakyat Indonesia terbitkan green bond Rp6 triliun”. IDNFinancials. 26 September 2023.

48 “BRI Kembali Menerbitkan Green Bond Senilai Rp 2,5 triliun”. Kontan.co.id. 6 Maret 2024.

49 “OJK Terbitkan POJK Nomor 18 Tahun 2023, Atur tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Bersifat Utang dan Sukuk Berkelanjutan”. Tempo.com. 19 Oktober 2023.

50 “Green Infrastructure Investment Opportunities; Indonesia: Green Recovery, 2022 Report”. Climate Bonds Initiative. 2022.

51 Ibid.

02. Membangun kerangka kerja yang kuat:

Sebagian besar bank telah mengembangkan kerangka kerja yang kuat yang menguraikan kriteria kelayakan proyek, proses seleksi, evaluasi, pengelolaan pendapatan, dan pelaporan dampak lingkungan. Meminta tinjauan eksternal atau pendapat pihak kedua – seperti yang dilakukan oleh *Climate Bonds Standards Scheme* – dapat meningkatkan kredibilitas kerangka kerja ini.

03. Penstrukturan (*structuring*) dan penetapan harga (*pricing*): Langkah ini melibatkan penentuan ukuran obligasi, jatuh tempo, mata uang, dan persyaratan lainnya, dengan mempertimbangkan target investor dan saluran tertentu. Untuk menarik basis investor yang lebih luas, bank-bank di Indonesia semakin menyelaraskan penawaran mereka dengan Prinsip-Prinsip Obligasi Hijau dari Asosiasi Pasar Modal Internasional (ICMA).

04. Penerbitan (*issuing*) and pengalokasian (*allocating*): Peluncuran obligasi hijau sering kali melibatkan acara promosi yang ditujukan kepada kelompok investor tertentu. Keputusan alokasi didasarkan pada preferensi investor, dengan pengungkapan yang jelas mengenai jenis dan wilayah investor.

05. Pelacakan dan pelaporan hasil: Pelaporan rutin mengenai penggunaan dana dan dampak lingkungan merupakan bagian integral dari kerangka obligasi hijau penerbitnya. Hal ini biasanya disampaikan melalui laporan tahunan yang memungkinkan dilakukannya pengawasan dan verifikasi bahwa pendapatan telah dialokasikan sebagaimana mestinya dan secara efektif berkontribusi terhadap dampak lingkungan yang diharapkan.

Kesenjangan dan Peluang Sektorial Utama untuk Obligasi hijau

Pada dasarnya, transisi kolektif kita menuju *net-zero* memerlukan penggunaan jalur transisi sektorial berdasarkan bukti ilmiah dalam strategi dan proses penetapan target di lembaga keuangan dan non-keuangan. Oleh karena itu, jalur sektorial – yang mencakup aspek-aspek seperti pengembangan dan/atau penerapan teknologi suatu sektor, variasi regional, penghentian aset, perubahan pasar, pengaruh



kebijakan, dan bauran energi – harus dipertimbangkan oleh bank dalam pembuatan rencana transisi *net-zero*, penyalarsan portofolio, dan keterlibatan dengan nasabah korporat.

Dalam konteks Indonesia, kami telah mengidentifikasi sektor-sektor ekonomi riil penghasil emisi utama berikut ini yang perlu dipertimbangkan oleh bank ketika mereka menjajaki potensi peluang obligasi hijau:



Pertanian

Perubahan iklim menimbulkan ancaman besar terhadap sektor pertanian di Indonesia, terutama pada tanaman pangan pokok seperti beras, kelapa sawit, karet, dan kopi. Pangan dianggap sebagai sektor kunci yang mendukung perekonomian

dan kehidupan sosial kita, oleh karena itu krisis yang sebagian besar disebabkan oleh perubahan iklim akan menyebabkan kemiskinan dan kelaparan di dunia, termasuk Indonesia. Keberlanjutan pertanian merupakan salah satu solusi untuk mengatasi masalah ini. Hal ini menggarisbawahi kebutuhan mendesak untuk penerapan strategi adaptif iklim – dan dengan demikian pendanaan ramah lingkungan – untuk mempercepat mitigasi. Pada 2022, pertanian berkelanjutan menerima investasi sebesar Rp66 triliun, dan angka ini diperkirakan akan terus meningkat mengingat status Indonesia sebagai produsen dan pengekspor produk pertanian utama dunia.⁵² Penerbitan baru-baru ini yang penting mencakup, misalnya, penerbitan obligasi hijau yang dikelola oleh fasilitas pembiayaan campuran yang didukung pemerintah, dengan dana yang diarahkan untuk pengembangan perkebunan karet alam di dua provinsi dan upaya penghijauan dan konservasi satwa liar di lahan seluas 27.000 hektar.⁵³ Ada peluang bagi Indonesia untuk mengubah ancaman krisis pangan dunia menjadi keuntungan dan meningkatkan cadangan devisa negara.⁵⁴



Energi

Dengan berkurangnya kemampuan fiskal pemerintah daerah, terdapat banyak peluang di sektor energi. Pada tahun 2020, anggaran fiskal pemerintah pusat sebagian besar diarahkan untuk kesehatan dan bantuan sosial karena pandemi COVID-19. Dengan target bauran

energi terbarukan hingga 23% pada tahun 2025, pemerintah perlu menginvestasikan tambahan 36,95 miliar Dolar AS di industri ini.⁵⁶ Obligasi ramah lingkungan berperan penting dalam mendanai proyek-proyek energi berkelanjutan dan membantu upaya dekarbonisasi di sektor energi, yang tentunya membutuhkan pendanaan paling besar – diperkirakan sebesar 228 miliar Dolar AS antara tahun 2018 dan 2030 – untuk mencapai target iklim Indonesia.⁵⁷ Peluang investasi yang signifikan mencakup proyek energi berkelanjutan, khususnya pengembangan panas bumi, pembangkit listrik tenaga air, dan energi surya. Penerbitan obligasi baru-baru ini yang penting adalah penggalangan dana obligasi ramah lingkungan sebesar 1,1 miliar Dolar AS oleh sebuah perusahaan energi terkemuka untuk pembayaran kembali pinjaman yang ada, biaya pembayaran terkait, dan pendanaan untuk dua operasi pembangkit listrik tenaga panas bumi di Indonesia.⁵⁸



Konsumen

Di Indonesia, dalam satu dekade terakhir telah terjadi bencana terkait cuaca yang mempengaruhi distribusi produk konsumen, manajemen rantai pasokan, dan kualitas produk. Menyadari perlunya memitigasi gangguan tersebut, perusahaan konsumen

kini berinvestasi dalam praktik ekonomi sirkular dan mengintegrasikan netralitas karbon ke dalam kerangka lingkungan, sosial, dan tata kelola (LST) mereka. Mengingat besarnya populasi Indonesia, masih banyak ruang untuk pertumbuhan obligasi hijau di industri ini. Sejumlah besar perusahaan barang konsumen yang bergerak cepat bertujuan untuk menerapkan strategi pengadaan yang lebih cerdas, seperti menggunakan kembali bahan-bahan pasca produksi dan secara inovatif mengalihkan limbah dari tempat pembuangan sampah. Sebuah perusahaan minuman terkemuka dunia, misalnya, menerbitkan obligasi ramah lingkungan untuk membiayai pengadaan kemasan daur ulang, pengumpulan sampah, dan pengelolaan air.⁵⁵



Pertambangan

Industri pertambangan, yang secara historis terkait dengan emisi karbon tinggi, menghadapi tantangan peraturan dan lingkungan yang signifikan akibat perubahan iklim. Untuk mengatasi permasalahan ini, banyak pelaku industri yang mempertimbangkan penggunaan

obligasi ramah lingkungan untuk memfasilitasi peralihan ke praktik yang lebih berkelanjutan, termasuk teknologi ramah lingkungan dan metode eksplorasi. Secara global, kami telah mengamati beberapa perkembangan penting dalam hal ini: sebuah perusahaan bijih besi terkemuka di Australia, misalnya, baru-baru ini menerbitkan obligasi sebesar 1,5 miliar Dolar AS, yang sebagian besar sejumlah 800 juta Dolar AS dialokasikan sebagai obligasi hijau untuk mendanai pengembangan energi terbarukan, peningkatan efisiensi energi, dan angkutan barang melalui laut dan pesisir yang bersih.⁵⁹ Pro dan kontra muncul di Indonesia ketika perusahaan batubara akan dipindahkan dari kategori merah atau bisnis yang tidak memenuhi kriteria hijau ke kategori hijau, khususnya sebagai kegiatan yang melindungi kegiatan lingkungan oleh OJK. Hal ini menimbulkan perdebatan karena batu bara bukan merupakan sumber energi terbarukan, namun hal ini juga memberikan peluang bagi obligasi hijau.⁶⁰

52 "Upaya pemerintah Indonesia dalam mendorong investasi global dan ekonomi hijau". Kementerian Investasi/BKPM. 2023.

53 Alti Kusmayadi & Raldi Hendro Koestoer. "Ensuring environmental sustainability of infrastructure projects: A perspective review in a case of Indonesia". *Earth and Environmental Science*, Volume 1111. 2022.

54 "Optimalisasi Pertanian Berkelanjutan dengan Pendanaan Green Sukuk sebagai Upaya Merealisasikan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan". *ibecfebui.com*. 26 Oktober 2022.

55 "Markets Monthly #9 - 09/10/2020". *Climate Bonds Initiative*. 9 Oktober 2020.

56 "Obligasi hijau daerah atasi kesenjangan investasi transisi energi". *Antaranews.com*, 14 Juli 2021

57 Suroso et al. "Revisiting the role of international climate finance (ICF) towards achieving the nationally determined contribution (NDC) target: A case study of the Indonesian energy sector". *Environmental Science & Policy*, Volume 131. 2022.

58 "Star Energy Geothermal group raises US\$ 1.11 billion from new green bonds, marks a significant milestone in the shift towards a more environmentally sustainable energy sector in Indonesia". *Star Energy*. 14 Oktober 2020.

59 "Fortescue makes foray into green-bond market". *Mining.com*. 6 April 2022.

60 "Bagaimana Bisa Batubara Masuk Taksonomi Hijau?". *PWYPIndonesia*. 17 September 2023.

Prospek Masa Depan

Meskipun obligasi hijau memberikan peluang yang belum dimanfaatkan bagi perusahaan untuk mengakses pembiayaan baru guna mendorong strategi *net-zero* mereka – dan bagi bank untuk mengakses *frontier market* yang baru – meningkatnya pengawasan terhadap produk keuangan ramah lingkungan dari investor dan regulator membuat pertimbangan kredibilitas penerbitan obligasi hijau menjadi penting. Para pemangku kepentingan semakin berharap untuk melihat dampak lingkungan dari dana yang diperoleh dari penerbitan tersebut, dan bahwa pelaporan terkait obligasi hijau didukung dengan data yang terpercaya.

Untuk meningkatkan kepercayaan terhadap pasar obligasi hijau dan menciptakan dampak keberlanjutan yang bermakna dan bertahan lama, para pelaku sektor perbankan Indonesia harus mempertimbangkan untuk mengambil langkah-langkah berikut:

01. Menyelaraskan pedoman dan standar obligasi hijau:

Untuk mengatasi kekhawatiran pemangku kepentingan seputar *greenwashing*, emiten dapat menggunakan standar untuk menetapkan struktur guna menentukan aktivitas mana yang dianggap “hijau”. Di tingkat global, emiten umumnya bergantung pada panduan yang diberikan oleh Prinsip Obligasi Hijau, Standar Obligasi Iklim, atau keduanya. Dalam konteks Indonesia, semua kriteria atau persyaratan tambahan untuk penerbitan obligasi hijau juga perlu dipertimbangkan sebagaimana diatur dalam POJK No. 18/2023 dan peraturan perundang-undangan setempat yang relevan sebagaimana tercantum dalam pasal 3 (1) POJK No. 18/2023.

02. Berfokus pada topik-topik penting LST:

Mengidentifikasi proyek-proyek yang memenuhi syarat dan memenuhi tujuan-tujuan LST organisasi yang spesifik terhadap lingkungan biasanya memerlukan pertimbangan panduan materialitas dari organisasi-organisasi yang menetapkan standar, serta prioritas keberlanjutan dari investor, penilai, dan pemangku kepentingan penting lainnya. Topik-topik LST yang penting bagi dunia usaha, isu-isu penting bagi para pemangku kepentingan, dan prioritas pendanaan proyek keberlanjutan semuanya dapat membantu menentukan dengan tepat standar atau kerangka kerja yang sesuai untuk tujuan suatu obligasi.

03. Mendorong kolaborasi antara fungsi keuangan dan keberlanjutan:

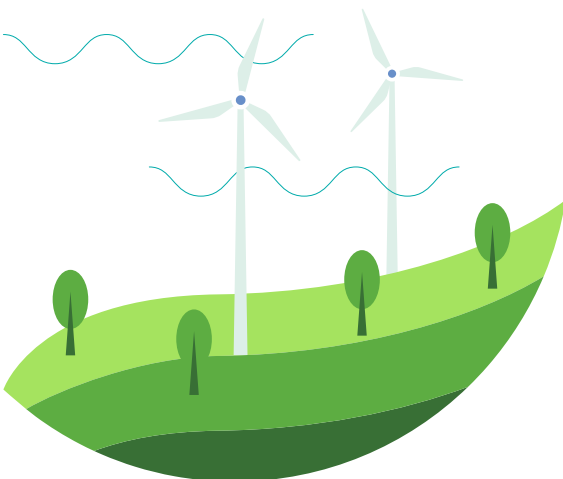
Komponen tata kelola sangat penting bagi peluncuran obligasi hijau yang efektif – dan sukses dalam jangka panjang. Untuk mewujudkan hal-hal tersebut, tim keuangan dan keberlanjutan harus bekerja sama secara formal, mungkin untuk pertama kalinya.

04. Menyoroti dampak keberlanjutan yang lebih luas:

Meskipun sebagian besar emiten biasanya mendapatkan penilaian pihak kedua atas kerangka kerja mereka selama proses pra-penerbitan, obligasi ramah lingkungan terus menarik perhatian atas klaim *greenwashing* – salah satunya karena spektrum hasil keberlanjutan yang dicapai melalui obligasi penggunaan dana cenderung sangat luas. Salah satu cara untuk meningkatkan potensi dampak keberlanjutan yang berarti dari obligasi hijau – dan dengan demikian, meningkatkan kredibilitas – adalah dengan mempertimbangkan penggunaan dana dari perspektif “tambahan”, yang didefinisikan oleh Protokol Gas Rumah Kaca (GRK) sebagai “kriteria untuk menilai apakah suatu proyek telah menghasilkan pengurangan emisi GRK, selain apa yang akan terjadi jika proyek tersebut tidak ada”.

05. Memperoleh jaminan dan verifikasi eksternal:

Seperti halnya laporan keuangan yang diaudit, jaminan eksternal atas laporan obligasi hijau dapat meningkatkan keandalan informasi yang dilaporkan – suatu elemen penting dalam membangun kredibilitas pasar obligasi hijau. Secara khusus, jaminan atas laporan penggunaan dana obligasi hijau – biasanya diberikan oleh auditor laporan keuangan penerbit – dapat memberikan jaminan yang sangat dibutuhkan bahwa hasil bersih dari penerbitan obligasi hijau telah digunakan untuk proyek-proyek ramah lingkungan yang memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam dokumen penerbitan.



Publikasi Deloitte Indonesia

Apakah Anda tertarik dengan Publikasi Deloitte Indonesia?

Sebagai upaya agar Anda senantiasa mengetahui isu dan tren terkini di Indonesia, kami memiliki tiga publikasi terkini terkait bisnis dan industri di Indonesia sebagai berikut. Anda dapat menemukan publikasi lain di situs web kami.

Jika Anda memiliki pertanyaan, silakan hubungi kami di iddttl@deloitte.com.

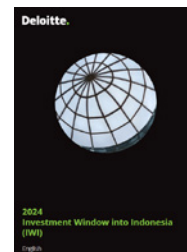
Navigating the Personal Data Protection Law in Indonesia

Dalam beberapa bulan terakhir, seiring dengan semakin dekatnya batas waktu masa tenggang Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (PDP), salah satu persyaratan khusus berdasarkan undang-undang tersebut – yaitu, penunjukan wajib petugas perlindungan data (DPO) untuk mengawasi semua aktivitas pemrosesan data pribadi di seluruh organisasi – telah menjadi sumber kekhawatiran yang signifikan bagi banyak organisasi akibat ketidakpastian perihal penunjukan dan struktur organisasi DPO. Dalam artikel ini, kami mengkaji isu-isu ini secara lebih rinci, dan memberikan serangkaian pertimbangan praktis yang dapat digunakan sebagai penunjukan DPO dan pembentukan fungsi DPO untuk organisasi.



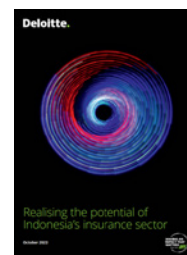
Investment Window into Indonesia (IWI)

Publikasi ini mengeksplorasi informasi penting mengenai investasi, lanskap hukum dan peraturan, perpajakan, audit dan kepatuhan, dan banyak aspek lainnya dalam menjalankan bisnis di Indonesia. Bertujuan untuk memberikan wawasan yang mendalam bagi calon investor, publikasi ini disusun dan disesuaikan dengan perkembangan kebijakan Indonesia terkini. Karya kolaboratif para ahli Deloitte Indonesia ini akan membantu Anda untuk lebih memahami peraturan, cara mendirikan perusahaan, dan informasi penting lainnya mengenai investasi dan penanaman modal di Indonesia.



Realising the potential of Indonesia's insurance sector

Industri asuransi Indonesia telah mengalami perubahan signifikan dalam beberapa tahun terakhir sebagai akibat dari peraturan perundang-undangan terkini, kemajuan teknologi, serta perubahan permintaan konsumen yang cepat. Dalam laporan ini, kami mengungkap tren dan perkembangan terkini yang membentuk kembali lanskap asuransi Indonesia – yang secara khusus berfokus pada segmen asuransi kesehatan, asuransi syariah, dan bancassurance syariah – yang mencakup berbagai isu utama yang berbeda-beda dalam lingkup kami, termasuk *Spin-off* syariah dan penerapan International Financial Reporting Standards (IFRS) 17 di Indonesia.



Hubungi kami

Brian Indradjaja

Clients & Markets (C&M) Coordinating Partner

bindradjaja@deloitte.com

Balim

Deputy C&M Coordinating Partner

bbalim@deloitte.com

Business Leader

Liana Lim

Audit Leader

lialim@deloitte.com

Service Desk Leader

Eugene Khoo

Chinese Services Desk

eugenekhoo@deloitte.com

Industry Leader

Iwan Atmawidjaja

Financial Services

Industry Leader

iatmawidjaja@deloitte.com

Antonius Augusta

Assurance Leader

aaugusta@deloitte.com

Heru Supriyanto

Japanese Services Desk

hsupriyanto@deloitte.com

Irina Putri

Technology, Media &

Telecommunication

Industry Leader

iputri@deloitte.com

Cindy Sukiman

Tax & Legal Leader

csukiman@deloitte.com

Bang Chi Young

Korean Services Desk

bangchiyoung@deloitte.com

Steve Aditya

Life Sciences & Health Care

Industry Leader

staditya@deloitte.com

Sahala Situmorang

Strategy, Risk, and Transactions

Leader

sahalasitumorang@deloitte.com

Dionisius Damijanto

Deloitte Private Desk

ddamijanto@deloitte.com

Cindy Sukiman

Energy, Resources and

Industrial Industry Leader

csukiman@deloitte.com

Iwan Atmawidjaja

Technology & Transformation

Leader

iatmawidjaja@deloitte.com

Satya Radjasa

State Own Enterprise Desk

sradjasa@deloitte.com

Silvano Damanik

Government & Public

Services Industry Leader

sthdamanik@deloitte.com



Deloitte.

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited (“DTTL”), its global network of member firms, and their related entities (collectively, the “Deloitte organization”). DTTL (also referred to as “Deloitte Global”) and each of its member firms and related entities are legally separate and independent entities, which cannot obligate or bind each other in respect of third parties. DTTL and each DTTL member firm and related entity is liable only for its own acts and omissions, and not those of each other. DTTL does not provide services to clients. Please see www.deloitte.com/about to learn more.

Deloitte Asia Pacific Limited is a company limited by guarantee and a member firm of DTTL. Members of Deloitte Asia Pacific Limited and their related entities, each of which is a separate and independent legal entity, provide services from more than 100 cities across the region, including Auckland, Bangkok, Beijing, Bengaluru, Hanoi, Hong Kong, Jakarta, Kuala Lumpur, Manila, Melbourne, Mumbai, New Delhi, Osaka, Seoul, Shanghai, Singapore, Sydney, Taipei and Tokyo.

About Deloitte Indonesia

In Indonesia, services are provided by Liana Ramon Xenia & Rekan, Deloitte Touche Solutions, PT Deloitte Konsultan Indonesia, and PT Deloitte Advis Indonesia.

This communication contains general information only, and none of DTTL, its global network of member firms or their related entities is, by means of this communication, rendering professional advice or services. Before making any decision or taking any action that may affect your finances or your business, you should consult a qualified professional adviser.

No representations, warranties or undertakings (express or implied) are given as to the accuracy or completeness of the information in this communication, and none of DTTL, its member firms, related entities, employees or agents shall be liable or responsible for any loss or damage whatsoever arising directly or indirectly in connection with any person relying on this communication.